

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PENANGANAN KAWASAN PEMUKIMAN
KUMUH DI KELURAHAN MACCINI SOMBALA
KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR**



Oleh:

RAUDATUL JANNAH LAHYA

Nomor Induk Mahasiswa: 105611119419

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINITRAASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSISAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2022/2023

SKRIPSI

EFEKTIVITAS PENANGANAN KAWASAN PEMUKIMAN

KUMUH DI KELURAHAN MACCINI SOMBALA

KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh

Gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara (S.AP)

Disusun dan Diajukan Oleh:

RAUDATUL JANNAH LAHYA

Nomor Induk Mahasiswa: 105611119419

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTARI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2023

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Efektivitas Penanganan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate Kota Makassar

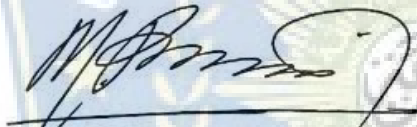
Nama Mahasiswa : Raudatul Jannah Lahya

Nomor Induk Mahasiwa : 105611119419

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

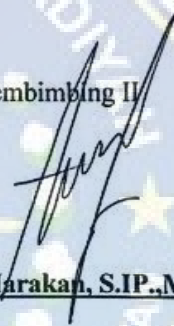
Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. Mappamiring, M.Si

Pembimbing II



Ahmad Harakan, S.IP., M.HI

Mengetahui:

Dekan



Dr. H. Hiyani Malik, S.Sos., M.Si

NBM: 730727

Ketua Program studi



Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si

NBM : 991742

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0174/FSP/A.4-II/VII/45/2023 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Selasa, 15 Agustus 2023


Mengetahui :

Ketua

Sekretaris

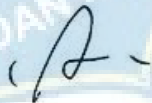
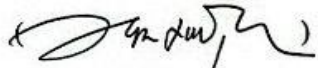
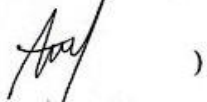


Dr. Hj. Ihvani Malik, S.Sos., M.Si

NBM: 730727


Andi Luthur Prianto, S.IP., M.Si

NBM: 992797

Tim Penguji:

1. Drs. H. Ansyari Mone, M. Pd ()
2. Dr. Haerana, S.Sos., M.AP ()
3. Ahmad Harakan, S. IP., M.HI ()
4. Nur Khaerah, S.IP., M.IP ()

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Raudatul Jannah Lahya

Nomor Induk Mahasiswa : 10561 1119419

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar Skripsi penelitian ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 08 Agustus 2023

Yang Menyatakan,

Raudatul Jannah Lahya

ABSTRAK

Raudatul Jannah Lahya, Efektivitas Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate Kota Makassar, Dibimbing oleh (1) Mappamiring, (2) Ahmad Harakan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Dalam penelitian ini metode kualitatif untuk memperoleh data (data primer dan data sekunder) melalui teknik pengumpulan data dalam bentuk observasi dan wawancara kepada narasumber yang terkait. Data yang diperoleh selanjutnya diolah dengan menggunakan serangkaian teknik atau metode, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi). Teknik pengabsahan data pada penelitian ini triangulasi sumber, triangulasi teknik, triangulasi waktu.

Hasil penelitian ini menunjukkan efektivitas penanganan kawasan permukiman kumuh tidak berjalan dengan efektif berdasarkan (1) Pencapaian tujuan pencapaian tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar dan Kelurahan Maccini Sombala untuk mengurangi permukiman kumuh, dengan memberikan bantuan berupa sembako dan bahan bangunan kepada masyarakat, belum berjalan efektif (2) Integrasi yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar Kelurahan Maccini Sombala berupa sosialisasi mengenai sampah dan kebersihan lingkungan, akan tetapi realita yang ada di lapangan tidak ada satupun sosialisasi yang dilakukan. Jadi bisa di katakana tidak efektif. (3) Adaptasi yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Kelurahan Maccini Sombala dengan adanya kunjungan atau pengecekan lokasi secara langsung kepada masyarakat sekaligus melihat kondisi masyarakat yang berada permukiman kumuh. Jadi bisa di katakana sudah efektif.

Kata kunci: Eektivitas Penanganan Permukiman kumuh

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektivitas Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate Kota Makassar”.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini begitu banyak rintangan dan tantangan dalam penyusunan skripsi, dengan adanya bantuan berupa moril dan material dari berbagai orang atau pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini maka penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Secara khusus penulis menyampaikan banyak terma kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis sangat dicintai dan dibanggakan Bapak Lahya S S.Pd dan Ibu Badriah yang telah melahirkan, merawat, membesarkan dengan penuh kasih saya yang tak terhingga, memberikan dorongan, semangat dan selalu menyertakan doanya baik berupa dukungan moral maupun material serta nasehat-nasehat sehingga penulis dapat melewati semua ini.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan

dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Mappamiring, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Ahmad Harakan, S.IP.,M.HIS selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing, mengarahkan, mengoreksi, serta selalu mendorong dan membantu untuk menyemangati penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Bapak Dr. Nur Wahid, S.Sos.,M.Si selaku ketua program studi ilmu administrasi Negara dan ibu Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP selaku sekretaris program ilmu administrasi Negara fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku ibu dekan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas muhammadiyah Makassar.
4. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku rector universitas muhammadiyah Makassar.
5. Para dosen jurusan ilmu administrasi Negara yang ikhlas telah memberikan ilmunya, dan seluruh staf pegawai ruang lingkup fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas muhammadiyah Makassar.
6. Untuk seluruh Informan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar, Kelurahan Maccini Sombala, dan masyarakat Kecamatan Tamalate yang bersedia meluangkan waktunya dan bersedia wawancara dalam membantu proses penelitian saya ucapkan banyak terimakasih.

7. Muh. Arjun Syaputra selaku kekasih saya yang terus memberikan dukungan dengan tulus selama berjuang menyelesaikan skripsi ini hingga tuntas.
8. Untuk Sahabat saya, Susianti, Nur Azisah, Winni Putri Pratiwi Nur Asia Mansyur, Serta teman SMK saya, Rezky septira irfan, Nadia damayanti, yang tidak pernah berhenti menyemangati saya, selalu menemani dengan setia, memberikan motivasi, dukungan serta kasih sayang kepada saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Untuk teman-teman seperjuangan Jurusan Ilmu Administrasi Negara Angkatan 2019 dan kepada Bapak Ibu Posko, Teman-teman KKP (Kuliah Kerja Profesi) Angkatan XXV Desa Baring Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep, untuk dukungan dan bantuannya saya ucapkan banyak terima kasih.
10. Untuk semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu saya ucapkan terimakasih banyak.

Demi kesempurnaan skripsi ini , saran dan kritik yan bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan bagi pihak yang membutuhkan.

WassalamuAlaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar 08 Agustus 2023

Raudatul Jannah Lahya

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENERIMAAN TIM.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Konsep Dan Teori.....	13
C. Kerangka Pikir.....	33
D. Fokus Penelitian	34
E. Deskripsi Fokus Penelitian	34

BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	36
B. Jenis dan Tipe Penelitian	36
C. Sumber Data.....	37
D. Informan Penelitian.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Teknik Analisis Data.....	39
G. Teknik Keabsahan Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	42
B. Hasil Penelitian.....	50
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	55
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	60

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	10
Tabel 3.1 Informan	38
Tabel 4.1 Daftar Nama Kecamatan di Kota Makassar	42
Tabel 4.2 Luas Daerah Kumuh berdasarkan Kecamatan di Kota Makassar.....	45
Tabel 4.3 Luas Daerah Kumuh di Kelurahan Maccini Sombala.....	46
Tabel 4.4 Visi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar	48
Tabel 4.5 Luas Daerah Kumuh berdasarkan Kecamatan di Kota Makassar.....	57



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir	33
Gambar 4.2 Peta Kota Makassar	43
Gambar 4.3 Sruktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	49



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah permukiman kumuh bukanlah hal baru yang dihadapi di Indonesia. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia Nomor 02/PRT/M2016 tentang peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, permukiman kumuh diartikan sebagai permukiman yang tidak layak huni karena tidak keteraturan bangunan dan tingkat kepadatan yang tinggi. Perukiman kumuh dicirikan dengan lingkungan yang terdegradasi, bangunan tidak layak huni dan berkepadatan tinggi, kurang terlayani infrastruktur dasar terutama sanitasi dan air bersih, kemiskinan, dan eksklusi sosial. Permukiman kumuh lebih banyak di temukan di Negara berkembang atau kurang berkembang sejalan dengan tingginya pertumbuhan populasi serta kemiskinan. (Siyoto Sodik, 2015)

Adapun kelebihan yang dimiliki oleh Kota metropolitan di Indonesia semakin maju tentunya memiliki dampak di balik modernnya. Semakin maju kotanya maka semakin banyak juga permasalahan yang akan muncul dan semakin tinggi bangunan yang menjulang maka semakin banyak pula wilayah kumuh di sekelilingnya. Hal ini terbukti dengan jumlah permukiman kumuh yang ada. Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar No 050. 05/1341/Kep/05/2014, Tentang penetapan lokasi

permukiman kumuh Kota Makassar Tahun Anggaran 2014, bahwa telah tercatat 103 Kelurahan yang termasuk wilayah kumuh dari 143 kelurahan.

Permukiman kumuh bukanlah hal yang baru dihadapi di Indonesia, apa lagi bagi kota yang padat penduduknya, bertambahnya penduduk tiap tahun jauh melampaui penyediaan kesempatan kerja di wilayah Indonesia. Sehingga dirasakan menambah berat tekanan permasalahan di kota-kota besar. Banyaknya fasilitas-fasilitas yang di buat seperti Mall, Wisata Laut, dan juga dijadikan sebagai pusat bisnis ini tentunya tidak dapat terjadi bila pemerintah tidak turut campur di dalamnya.

Tumbuh dan berkembangnya perkotaan sangat dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan penduduk setiap Tahunnya (Silvia, 2017). Berkaitan dengan hal tersebut tentu saja terdapat beberapa hal yang mendorong pertumbuhan penduduk yang tinggi diantaranya adalah penambahan jumlah penduduk sehingga urbanisasi yang tinggi. Disamping itu, pembangunan daerah tidak akan bisa disamaratakan karena adanya perbedaan budaya, keadaan sosial, dan beberapa faktor lainnya. Pesatnya perkembangan kota-kota tersebut tentu saja dapat menimbulkan permasalahan yang menyangkut seluruh aspek kehidupan, dimana perkembangan kawasan perkotaan mengisyaratkan munculnya pertumbuhan ekonomi yang pesat sehingga membawa konsekuensi yang berdampak pada munculnya permukiman kumuh.

Permukiman kumuh sebenarnya merupakan permukiman yang kurang layak huni, karena kondisi bangunan yang tidak teratur dengan

kepadatan bangunan yang melebihi kapasitas, serta prasarana pada bangunan yang belum memenuhi syarat ketentuan. Keberadaan lingkungan kawasan kumuh ternyata memicu munculnya permasalahan, seperti memberikan efek visual yang jelek, perkembangan fisik kota yang tidak baik, serta tingkat kesehatan masyarakat yang semakin rendah (Purto, 2011). Selain itu dampak lingkungan permukiman kumuh juga dapat dilihat dari segi Pemerintahan dan Sosial, dimana Pemerintah di pandang tidak memiliki kehidupan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Perkembangan wilayah perkotaan dari waktu ke waktu berbagai macam dampak, baik pola kehidupan sosial masyarakat maupun kondisi fisik wilayah perkotaan itu sendiri. Pembangunan dan laju pertumbuhan penduduk yang meningkat membawa perubahan, salah satunya adalah perubahan pada tingkat kualitas lingkungan. Sebanyak 432.115 jiwa atau 131.299 kepala keluarga (kk) dari total penduduk Kota Makassar yang menetap dalam kawasan pemukiman kumuh. Luasan kawasan pemukiman kumuh di Kota Makassar diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori kumuh berat, kumuh sedang dan kumuh ringan. Kumuh berat terdapat di 36 kelurahan, kategori kumuh sedang di 49 kelurahan dan 17 kelurahan masuk kategori kumuh ringan. (Nursan & Kahar, 2019)

Permukiman kumuh di perkotaan dapat muncul karena pesatnya urbanisasi yang memicu penambahan penduduk, keterbatasan kemampuan penduduk dalam mengakses permukiman formal mendorong kemunculan

permukiman informal yang dapat berkembang jadi permukiman kumuh. Adapun temuan dalam studi tentang permukiman kumuh di india bahwa urbanisasi sejalan dengan kemunculan permukiman kumuh apabila pemerintah tidak mampu mengatur urbanisasi yang terjai. Dan urbanisasi di daerah perkotaan menimbulkan beragam permasalahan, salah satu di antaranya adalah semakin banyak permukiman kumuh di daerah perkotaan. Penghuni permukiman kumuh adalah sekelompok orang yang datang dari desa menuju kota dengan tujuan ingin mengubah nasib. Salah satunya di Kota Makassar tingginya laju pertumbuhan penduduk di Kota Makassar yang di sebabkan oleh arus urbanisasi di daerah rural di sekitarnya serta tidak seimbangnya laju pertumbuhan penduduk dan tersediaan lahan bagi permukiman kumuh di Kota Makassar, terutama pinggiran Kota.

Permukiman kumuh adalah salah satu dari sekian banyak permasalahan penataan ruang tidak terkecuali di Kota Makassar. Pengelolaan perumahan permukiman dalam rencana pengembangan kawasan permukiman Pasal 17 ayat (6) butir 1 poin (a) dan (b) RTRW Kota Makassar, mengatakan bahwa rencana pengembangan pola perbaikan lingkungan pada kawasan permukiman kumuh berat dan sedang di (mangasa, parang tambung, tanjung merdeka, barombong dan maccini sombala) termasuk kawasan permukiman yang berada di Kecamatan Tamalate. Dan permukiman kumuh antara lain di sebabkan karena keterbatasan kemampuan akses lokasi sehingga turun temurun dari waktu kewaktu. Kota Makassar merupakan kota terbesar ke-empat di Indonesia

dan terbesar di kawasan Timur Indonesia, memiliki luas area 175,79 km² dengan jumlah penduduk sekitar 1 juta jiwa, dengan demikian Kota Makassar bisa dikatakan sebagai kota metropolitan. Kondisi perekonomian yang tak terkendali dan semakin manambah angka kemiskinan yang berdampak pada kondisi fisik dan non fisik kehidupan dan penghidupan masyarakat yang secara nyata dan jelas tercermin pada menurunnya kualitas lingkungan tempat tinggal masyarakatnya. Hal ini akan menambah luas permukiman kumuh di Kota Makassar, salah satunya adalah di Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Kecamatan Tamalate merupakan salah satu dari 14 Kecamatan di Kota Makassar yang terdiri dari 10 Kelurahan Barombong, Tanjung Merdeka, Maccini Sombala, Balang Baru, Jongaya, Bungaya, Pa'baeng-baeng, Mannuruki, Parang Tambung dan Mangasa.

Adapun Kelurahan yang termasuk wilayah kumuh berat yang ada di Kecamatan Tamalate yaitu Kelurahan Mangasa, Parang Tambung, Tanjung Merdeka, Barombong dan Maccini Sombala. Pentingnya penanganan permasalahan lingkungan salah satunya adalah penanganan permukiman kumuh, sejalan dengan apa yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kumuh bahwa perencanaan kawasan permukiman harus mencakup a. Peningkatan sumber daya perkotaan atau perdesaan; b. mitigasi rencana; c. penyediaan atau peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum. Perumahan dan Kawasan Permukiman kumuh yang telah mencapai

60 persen. Namun yang terjadi masih terlihat bahwa di Kecamatan Tamalate yang termasuk kumuh berat masih memiliki jalanan yang rusak, adanya penumpukan sampah dan drainase yang rusak.

Kelurahan Maccini Sombala merupakan salah satu dari 14 Kecamatan di Kota Makassar yang terdiri dari 10 kelurahan. Berdasarkan keputusan Walikota Makassar Nomor 826/653.2/Tahun 2018 Tentang Revisi dan Verifikasi lokasi Permukiman Kumuh di Kota Makassar Tahun Anggaran 2018, wilayah kumuh di Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate. Menunjukkan bahwa Kelurahan Maccini Sombala termasuk dalam kategori kawasan kumuh berat.

Adapun masalah di lokasi permukiman kumuh di Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate Kota Makassar menunjukkan bahwa Kelurahan Maccini Sombala termasuk kategori kawasan kumuh berat, sehingga sangat penting diperhatikan oleh pemerintah setempat. Awal mulanya muncul Permukiman Kumuh di Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate Kota Makassar pada tahun 2018 karena faktor tata ruang yang kurang memadai. Dan kondisi bangunan yang kurang baik, tempat pembuangan sampah yang tidak tersedia, sehingga terlihat banyak tumpukan sampah yang berada di sekitar permukiman kumuh, dan bisa menyebabkan rawan terjadi penyakit sosial dan penyakit lingkungan, saluran yang kurang memadai dan kurang terjalani sarana dan prasarana yang memadai dan masyarakat di daerah tersebut kurang berdaya dalam, segi keuangan, ataupun pengetahuan, masyarakat di kawasan permukiman

kumuh bisa di katakan tidak berdaya dalam segi ekonomi, dan tidak berdaya dalam segi finansial, dan tidak berdaya dalam segi ilmu pengetahuan. Ketidak Keberdayaan itu disebabkan karena keadaan yang terpaksa sehingga masyarakat masih tetap tinggal di kawasan permukiman kumuh.

Berdasarkan data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar peningkatan permukiman kumuh di Kecamatan Tamalate sendiri tercatat pada tahun 2021 terdapat 75,76 Ha luas daerah kumuh dengan penduduk 6.227 penduduk jiwa di daerah kumuh. Berdasarkan data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar di Kecamatan Tamalate sendiri luasan daerah kumuh pada tahun 2022 terdapat 75,76 Ha dengan 85.87 penduduk jiwa di daerah kumuh.

Terkait dengan penanganan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate Kota Makassar organisasi yang terkait telah melakukan penanganan pada tahun 2020 ada dua organisasi pemerintah yang terlibat yaitu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar, dan Kelurahan Maccini Sombala, adapun bentuk keterlibatan dari dua organisasi pemerintah yaitu memberikan bantuan berupa sembako dan bahan bangunan. Adapun permasalahan yang ada dilokasi penelitian sehingga peneliti melakukan penelitian ini dikarenakan bantuan yang diberikan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Makassar, itu belum mampu menangani permasalahan yang ada dilokasi penelitian dan belum memberikan

perubahan yang signifikan pada kawasan pemukiman kumuh yang ada di Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate Kota Makassar.

Mengingat bagaimana fenomena dari latar belakang di atas. Karna itu penulis merasakan bahwa penting di perhatikan oleh pemerintah yaitu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Kelurahan Maccini Sombala, agar berkurangnya permukiman kumuh di khususnya di Kota Makassar, sehingga di perlukan peningkatan efektivitas penanganan kawasan permukiman kumuh. Oleh karena itu penulis mengambil judul “Efektivitas Penanganan Kawasan Pemukiman Kumuh di Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate Kota Makassar”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana efektivitas penanganan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang di telah di jelaskan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui efektivitas penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat peneliti yang diharapkan oleh peneliti:

1. Manfaat teoretis

Hasil peneliti ini dapat dijadikan bahan referensi dalam menganalisis dan menilai penanganan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate Kota Makassar.

2. Manfaat praktis

Bagi instansi yang berkaitan dengan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah di wilayah Kelurahan Maccini Sombala dalam rangka penanganan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate Kota Makassar.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan bagi penulis untuk melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penulis mengangkat beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi atau tambahan informasi, berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1.	Muhamad Ilham Satrio, Annisa Mu'awanah Sukmawati(2021)	Kebertahanan Masyarakat Pada Permukiman Kumuh Berdasarkan Aspek Sosial Ekonomi Di Kelurahan Salatiga, Kota Salatiga	Permukiman kumuh merupakan lingkungan hunian yang kurang layak huni. Penelitian berlokasi di RW 7 Turusan, Kelurahan Salatiga, Kota Salatiga. Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kebertahanan masyarakat pada permukiman kumuh di RW 7 Turusan Kelurahan Salatiga, Kota Salatiga ditinjau dari aspek sosial ekonomi masyarakatnya.

			<p>Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada tujuh responden, observasi lapangan, dan telah dokumen/ literatur terkait.</p>
2.	As'ari, Ruli, Siti Fadjarani(2018)	Penataan Permukiman Kumuh Berbasis Lingkungan	<p>Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat di simpulkan bahwa kecamatan bungursari memiliki potensi utama yaitu adalah sebagai pusat lingkungan. Selain itu pengembangan kawasan pemukiman kumuh berbasis lingkungan dapat di lakukan dengan pendekatan brikut: Pengembangan kawasan Kecamatan Bungursari sebagai pusat lingkungan adalah peeningkatan potensi perdagangan kecil dan menengah melalui UMKM dan jasa penunjang kegiatan perdagangan.</p>
3.	Weldy Anugrah Riawan (2022)	Penanganan Kawasan Kumuh Di Beberapa Daerah Di Jawa Dan Sumatera	<p>Peran pemerintah daerah dalam agenda pembangunan berkelanjutan belum sepenuhnya dapat mencapai tujuan ke-11 SDGS, yaitu membuat kota dan pemukiman penduduk yang</p>

			<p>inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi out of the box dalam mensikapi tujuan ke-11 SDGS agar dapat dicapai oleh Pemerintah Daerah di Indonesia yang menggunakan metoda analisis deskriptif kualitatif berbasis data sekunder.</p> <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemerintah daerah yang harus didorong dalam rangka mensukseskan tujuan tersebut adalah memfasilitasi pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan di permukiman kumuh dan pesisir dengan cara melindungi dan memperbaiki ekosistem, mendorong pengurangan/manajemen risiko bencana, mengatasi kumuh, tuntas, komunitas, kelembagaan, kolaborasi, berdasarkan rumusan strategi.</p>
--	--	--	---

Dari hasil penelitian terdahulu, adapun yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan di angkat oleh penulis yaitu terletak pada fokus dan tujuan penelitian. Di penelitian ini penulis

mencoba mengetahui bagaimana efektivitas dalam penanganan untuk mengurangi pemukiman kumuh di Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Sedangkan pada penelitian terdahulu berfokus pada penataan pemukiman kumuh.

Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis teliti terletak pada kontribusi yang dilakukan oleh organisasi pemerintah untuk mengurangi permukiman kumuh.

B. Konsep Dan Teori

1. Konsep Efektivitas

Kata efektivitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketetapan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Di sebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. (Han et al., 2019)

Efektivitas umumnya di pandang sebagai tingkat pencapaian tujuan operatif dan operasional. Pada dasarnya efektivitas adalah tingkat pencapaian tugas sasaran organisasi yang di tetapkan. Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang di lakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini dapat di artikan, apabila suatu pekerjaan dapat dilakukan sesuai dengan yang direncanakan,

dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga dan yang lainnya.

Sondang P. Siagian (2001:24) yang berpendapat bahwa efektivitas adalah penggunaan sumber daya, sarana dan prasarana sampai batas tertentu yang secara sadar telah ditentukan sebelumnya untuk menghasilkan beberapa barang atas jasa yang diberikannya. Kinerja menunjukkan keberhasilan berdasarkan tercapai atau tidaknya tujuan. Jika hasil kegiatan mendekati tujuan, ini berarti efisiensi yang lebih besar. Kegiatan seseorang berbicara tentang efektivitas sebagai manajemen kerja, berarti fokusnya adalah pada pencapaian berbagai tujuan, yang ditentukan oleh penggunaan tepat waktu dari sumber daya tertentu yang tersedia, harus ditentukan terlebih dahulu, dan hasil yang dicapai dengan menggunakan sumber daya tersebut. Maka hasil harus dicapai dalam waktu yang ditentukan.

Efektivitas memiliki pengertian yang berbeda dengan efisiensi. Seperti yang dinyatakan oleh Syamsi dalam bukunya pokok-pokok Organisasi dan manajemen, bahwa: “Efektivitas (hasil guna) ditentukan pada efeknya, hasilnya dan kurang memperdulikan pengorbanan yang perlu diberikan untuk memperoleh hasil tersebut. Sedangkan efisiensi (daya guna), penekanannya disamping pada hasil yang ingin dicapai, juga besarnya pengorbanan untuk mencapai hasil tersebut perlu diperhitungkan” (Syamsi, 1988:2).

Adapun menurut ahli yang dikemukakan oleh (Richard M. Steers 1985) mengenai ukuran efektivitas sebagai berikut:

- a. Pencapaian Tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu:
Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkit.
- b. Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi. Pengembangan consensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.
- c. Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja (Lestari,2021)

Ada beberapa pendekatan mempengaruhi efektifitas yaitu:

1. Pendekatan sasaran (*Goal Approach*)

Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektifitas di mulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkatan keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut.

Sasaran yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektifitas dengan pendekatan ini adalah sasaran yang realistic untuk memberikan hasil maksimal berdasarkan sasaran resmi

“*Official Goal*” dengan memperhatikan permasalahan yang ditimbulkannya, dengan memusatkan perhatian terhadap aspek *output* yaitu di rencanakan.

Dengan demikian, pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana organisasi atau lembaga hasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Efektivitas juga selalu memperhatikan faktor waktu pelaksanaan. Oleh karena itu, dalam efektivitas selalu terkandung unsur waktu pelaksanaan dan tujuan tercapainya dengan waktu yang tepat maka program tersebut akan lebih efektif. Contoh dari pendekatan sasaran yaitu apabila suatu pekerjaan mempunyai target menjual habis barangnya dalam waktu satu minggu, dan barang tersebut terjual habis dalam waktu satu minggu, maka pekerjaan tersebut dapat di katakana efektif.

2. Pendekatan Sumber (*System Resource Approach*)

Pendekatan sumber mengukur efektivitas melalui keberhasilan suatu lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkannya. Suatu lembaga harus dapat memperoleh berbagai macam sumber dan juga memelihara keadaan dan system agar dapat menjadi efektif. Pendekatan ini berdasarkan pada teori mengenai keterbukaan system suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena lembaga mempunyai hubungan yang merata dalam lingkungannya, dimana dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan seingkai bersifat langka dan

bernilai tinggi. Pendekatan sumber dalam kegiatan usaha organisasi dilihat dari seberapa jauh hubungan antara anggota binaan program usaha dengan lingkungan sekitarnya, yang berusaha menjadi sumber dalam mencapai tujuan.

3. Pendekatan Proses (*Inernal Process Approach*)

Pendekatan proses menganggap sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan erhadap sumber-sumber yang dimiliki lembaga, yang menggambarkan tingkat efesiensi serta kesehatan lembaga.

Adapun Faktor-Faktor Pengaruh Utama Atas Efektifitas:

a. Ciri organisasi

Struktur dan teknologi organisasi dapat mempengaruhi segi-segi tertentu dari efektifitas dengan berbagai cara. Mengenai struktur ditemukan bahwa meningkatnya produktivitas dan efesiensi sering merupakan hasil dari meningkatnya spesialisasi fungsi, ukuran organisasi, sentralisasi pengambilan keputusan, dan formalisasi.

b. Ciri lingkungan

Disamping ciri organisasi, lingkungan luar dan dalam juga telah dinyatakan berpengaruh atas efektifitas. Keberhasilan hubungan organisasi-lingkungan tampaknya amat bergantung pada tiga variabel kunci : (1) tingkat keterdugaan keadaan lingkungan. (2) ketepatan persepsi atas keadaan lingkungan, dan (3) tingkat rasionalitas organisasi. Ketiga faktor ini mempengaruhi ketepatan tanggapan organisasi terhadap perubahan lingkungan.

c. Ciri pekerja

Faktor pengaruh penting yang ketiga atas efektifitas adalah para pekerja itu sendiri. Pada kenyataannya anggota-anggota organisasi mungkin merupakan faktor pengaruh yang paling penting atas efektifitas karena tingkah laku merekalah yang dalam rangka panjang akan mempelancar atau merintanginya tercapainya tujuan organisasi.

d. Kebijakan dan praktek manajemen

Mekanisme ini meliputi penetapan tujuan strategi, pencarian dan pemanfaatan sumber daya secara efisien, menciptakan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan dan adaptasi dan inovasi organisasi.

e. Penetapan tujuan strategi

Jika efektifitas berkepentingan dengan kemampuan manajemen untuk mendapatkan dan mengatur sumber daya bagi

pencapaian tujuan organisasi maka pemilihan tujuan-tujuan ini (baik yang operaktif maupun operasional) menjadi faktor yang kritis. Pengertian penetapan tujuan meliputi identifikasi tujuan organisasi yang berlaku umum dan penetapan bagaimana berbagai tujuan, kelompok dan individu dapat memberikan sumbangannya bagi tujuan-tujuan ini.

f. Pencarian dan sumber daya

Sehubungan dengan usaha manajemen dan memanfaatkan sumber daya, telah diidentifikasi tiga bidang yang saling berhubungan. Pertama adalah keharusan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai subsistem organisasi (sub sistem produktif, pendukung, pemeliharaan, penyesuai, dan manajemen) sehingga setiap sub sistem memiliki sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas utamanya. Kedua berhubungan dengan penetapan, pengimplementasian dan pemeliharaan pedoman-pedoman kebijakan.

g. Lingkungan prestasi

Manajer wajib merancang lingkungan kerja yang memberikan fasilitas yang sejauh mungkin konsisten dengan sumber daya yang tersedia. Yang harus diperhatikan oleh manajemen dalam bidang ini meliputi : (1) prosedur pemeliharaan dan penempatan pekerja, (2) pendidikan dan pengembangan pekerja, (3) desain tugas, (4) penilaian dan pemberian imbalan pada prestasi.

h. Proses komunikasi

Adalah jauh lebih mudah mengidentifikasi persoalan dalam komunikasi organisasi daripada mencarakan pemecahannya. Langkah penting untuk meminimalkan masalah-masalah ini meliputi pengakuan bahwa komunikasi dalam organisasi menjalani suatu proses evolusi, yang membutuhkan waktu berkembang sampai menjadi seperti sekarang ini.

i. Kepemimpinan dan pengambilan keputusan

Bila diketahui bahwa kepemimpinan dan proses pengambilan keputusan memegang peranan sentral dalam tingkah laku organisasi, kita wajib memperhatikan beberapa cabang variasi dalam proses-prosesnya sepanjang mereka mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan organisasi.

j. Adaptasi dan inovasi organisasi

Sepanjang pembahasan mengenai sifat efektivitas organisasi, selalu ditekankan keharusan bagi para manajer untuk selalu siap menyesuaikan diri organisasi mereka dengan perubahan dalam lingkungan. Dalam kenyataannya adaptasi dan inovasi oleh banyak orang dianggap sebagai cap efektivitas itu sendiri.

2. Konsep Permukiman Kumuh

Istilah mengenai permukiman kumuh sebelumnya mulai muncul di Inggris pada tahun 1880, di mana ketika itu sedang gencar-gencarnya gerakan reformasi perumahan yang menyatakan beberapa konsep operasional terkait material rumah yang tidak layak bagi kehidupan

manusia. Maksudnya adalah standar pelayanan perumahan di negara tersebut dianggap sudah tidak memenuhi kelayakan terutama dalam hal teknis penyediaan material bangunan rumah. Hal ini memunculkan gagasan bahwa kawasan kumuh sudah harus di masukkan dalam pemetaan perencanaan sebuah kota yang termuat dalam agenda pembangunan kota.

Pada dasarnya, indikator kawasan kumuh di masing-masing negara memiliki kaitan yang sama, yaitu tentang rumah beserta PSU-nya. Berdasarkan pendapat Acharya (2010), kawasan kumuh didefinisikan sebagai hunian yang tidak memadai karena tidak adanya ketersediaan fasilitas fisik (Ruang Terbuka Hijau/RTH, drainase, *supply* air bersih, jaringan komunikasi, dan lain-lain), dan fasilitas sosial (organisasi, sosial, kesehatan, dan sebagainya). Menurut UN-Habitat, definisi kumuh memiliki indikator dari segi pelayanan dasar yaitu, akses terhadap air bersih, sanitasi, kualitas struktur rumah (atap, lantai, dan dinding) serta kepadatan luas lantai per kapita dimana rumah akan tergolong kumuh (tidak layak huni) apabila luas lantai lebih kecil atau sama dengan 7,2m.

Lembaga *Cities Alliance Action Plan* mendefinisikan bahwa kawasan kumuh merupakan bagian kota yang terabaikan sehingga mengakibatkan perumahan dan kondisi kehidupan masyarakatnya berada dalam status miskin. Kawasan ini dapat terletak di tengah kota dengan kepadatan yang tinggi atau terbangun secara spontan di pinggiran kota.

Adapun Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Berdasarkan definisi-definisi yang telah di sebutkan sebelumnya, dapat di ambil benang merah terkait dengan indikator-indikator mengenai kawasan kumuh, di antaranya:

a. Kurangnya pelayanan pasar

Dalam hal ini, Penghuni kawasan kumuh memiliki keterbatasan atau bahkan tidak memiliki akses terhadap pelayanan dasar seperti fasilitas sanitasi, sumber air bersih, sistem pengumpulan atau pengolahan sampah, jaringan listrik, dan drainase.

b. Rumah tidak layak huni

Kondisi rumah yang tidak layak huni dapat diartikan sebagai rumah yang dibangun dengan material nonpermanen untuk atap bukan genting, lantai tidak keras, dinding terbuat dari bahan bambu (*gedhek*).

c. Permukiman dengan tingkat kepadatan tinggi

Kepadatan yang dimaksud dalam hal ini adalah banyaknya bangunan rumah yang terdapat pada satu area kawasan kumuh. Hal ini akan menunjukkan betapa sempitnya ruang yang tersedia bagi

tiap orang. Berdasarkan keputusan Direktorat Jendral Pembangunan Daerah Kementrian Dalam Negeri, kepadatan bangunan yang tergolong tinggi adalah sebesar > 100 bangunan/ha dengan kepadatan penduduk > 200 jiwa/km.

d. Kondisi hidup yang tidak sehat dan lokasi yang berisiko

Kawasan kumuh identik pula dengan kondisi penduduk yang tidak sehat. Dalam hal ini dapat dimaknai dengan lingkungan permukiman penduduk yang tidak memenuhi standar kesehatan sehingga berdampak pada kerentanan terhadap kesehatan penduduk.

3. Urgensi Penanganan Permukiman Kumuh

Faktor utama dalam permukiman kumuh (*slum*) adalah kemiskinan ketiadaan akses bermukim yang layak di mana mencakup perumahan dan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), legalitas bermukim yang dibuktikan dengan kepemilikan tanah, serta lemah dan buruknya tata kelola pemerintahan (*governance*). PBB telah memprediksi adanya jumlah pengawasan kumuh dari tahun 1990 sampai 2005 yang mencapai 10%. Akan tetapi prediksi tersebut tidak berlaku jika populasi dan urbanisasi terus meningkat. Pada tahun 2030, sekitar 2 juta masyarakat perkotaan akan tinggal di kawasan kumuh. Hal ini didasarkan pada tingkat urbanisasi (UN-Habitat, 2007 dalam Acharya, 2010).

Menurut peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M2016 tentang peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, permukiman kumuh diartikan sebagai permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan dan tingkat kepadatan bangunan yang tinggi. UN-Habitat (2007) juga menyebutkan bahwa permukiman kumuh dicirikan dengan lingkungan yang terdegradasi, bangunan tidak layak huni dan berkepadatan tinggi, kurang terlayani infrastruktur dasar terutama sanitasi dan air bersih, kemiskinan, dan eksklusi social. Lebih lanjut, Mahabir et al. (2016) menyatakan bahwa permukiman kumuh lebih banyak ditemukan pada negara berkembang atau kurang berkembang sejalan dengan tingginya pertumbuhan populasi serta kemiskinan.

Seperti temuan Dewi & Syahbana (2015) bahwa adanya ikatan sosial/kekerabatan yang erat serta ektivitas budaya mempengaruhi kebertahanan penduduk pada permukiman informal. Beberapa temuan lain juga menunjukkan bahwa kebertahanan masyarakat pada permukiman kumuh terbentuk karna adanya hubungan turun menurun yang menyebabkan jarang nya pendatang baru.

a. Dampak adanya permukiman kumuh

Terciptanya sebuah kawasan kumuh tentu akan berdampak pada beberapa aspek, baik secara lokal maupun nasional. Secara umum, dampak yang ditimbulkan dari adanya kawasan kumuh

berpengaruh terhadap aspek lingkungan, manusia, dan sosial-ekonomi. Masing-masing aspek tersebut memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya dan tidak dijalankan secara sendiri, tercantum dalam dokumen pembangunan perkotaan.

Dari aspek lingkungan, kawasan kumuh akan berdampak sebagai faktor penurunan kualitas lingkungan, misalnya kawasan ini menjadi kawasan rawan bencana terutama banjir dan kebakaran. Hal ini dikarenakan adanya kepadatan bangunan yang terbilang tinggi, lokalisasi pengumpulan barang-barang bekas, dan ketiadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai area peresapan air hujan.

Penurunan kualitas lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap aspek kesehatan masyarakat terutama rentan karena terkena resiko penyakit berbasis lingkungan. Masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh umumnya lebih memikirkan pergerakan ekonomi keluarganya dibanding aspek kesehatan lingkungan, walaupun tetap masih akan terlihat adanya fenomena kesenjangan sosial-ekonomi. Hal ini dimaklumi karena mereka tidak memiliki pilihan lain untuk dapat tinggal di hunian yang layak. Keadaan seperti ini memaksa penduduk rentan pula terhadap resiko kejahatan (*urban crime*) baik menyangkut permasalahan pribadi karena faktor minimnya privasi maupun umum seperti penggusuran. Hal ini tentu akan berdampak besar terhadap psikologis penduduk tersebut terutama bagi anak-anak yang sedang mengalami proses pertumbuhan.

Dampak kawasan kumuh dari tiga aspek di atas akan sangat erat hubungannya dengan pembangunan perkotaan yang diharapkan di masa mendatang. Kota sebagai daerah pusat kegiatan akan memberi kesan pencipta dan perputaran roda kehidupan bagi sebagian besar penduduk. Berdasarkan Havey (2008), kota merupakan situs yang berfungsi untuk menyerap, mendistribusikan, sekaligus memproduksi, surplus yang dihasilkan melalui operasionalisasi kapital.

Ada indikasi bahwa semakin berkembang sebuah kota maka akan semakin besar daya tariknya bagi penduduk terutama penduduk yang tinggal di sekitar maupun jauh dari kota tersebut. Sesuai dengan hakikat tanah yang didasarkan pada sosiodemografis kota yang padat dan dinamis, tanah di perkotaan telah banyak di manfaatkan untuk berbagai macam fungsi atau peruntukan. Dampak yang ditimbulkannya, yaitu sangat sulit untuk menemukan tanah kosong yang luas atau cukup untuk dibangun sebuah perumahan.

Adapun pendapat lain dari ahli menurut (Jamaluddin 2015) penyebab utama tumbuhnya pemukiman kumuh adalah sebagai berikut:

- a. Urbanisasi dan migrasi yang tinggi, terutama bagi kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah.
- b. Sulit mencari pekerjaan
- c. Sulitnya mencicil atau menyewah rumah

- d. Kurang tegasnya pelaksanaan perundang-undangan.
- e. Perbaikan lingkungan yang hanya di nikmati oleh para pemilik rumah serta di siplin warga yang tendah.

Adapun beberapa ciri-ciri pemukiman kumuh yaitu:

- a. Fasilitas umum yang kondisinya kurang atau tidak memadai.
- b. Kondisi hunian rumah dan pemukiman serta penggunaan ruangnya mencerminkan penghuninya yang kurang mampu/miskin.
- c. Adanya tingkat frekuensi dan kepadatan volume yang tinggi dalam penggunaan ruang-ruang yang ada di pemukiman kumuh sehingga mencerminkan adanya kesemrawutan tata ruang dan ketidakberdayaan ekonomi penghuninya.
- d. Pemukiman kumuh merupakan suatu satuan-satuan komuniti yang hidup secara tersendiri dengan batas-batas kebudayaan dan sosial yang jelas.
- e. Penghuni pemukiman kumuh secara sosial dan ekonomi tidak homogen, warganya mempunyai mata pencaharian dan tingkat kepadatan yang beranekaragam, begitu juga asal muasalnya.

Faktor-faktor penyebab kekumuhan:

- a. Faktor jumlah penghuninya

Pada kenyataan di kawasan studi kebanyakan tiap rumah dengan luas tidak lebih dari 36 m² dihuni oleh 4 orang dengan jarak rumah yang cukup sempit atau berdempet. Dari standar

minimal dari Dirjen Cipta Karya hal ini dianggap tidak ideal karena dapat diasumsikan bahwa 1 kamar tidur dimanfaatkan oleh 2-3 orang, juga tentu saja dengan luasan yang terbatas tersebut kebutuhan ruang-ruang tidak terpenuhi dan tidak dapat diorganisasikan dengan baik.

Dalam hal ini jumlah penghuni dalam suatu rumah dapat ikut andil dalam membentuk kekumuhan suatu kawasan. jika rumah jumlah penghuninya bertambah sering pemilik rumah menambahkan atau memperluas bangunan mereka tanpa menghiraukan aturan-aturan yang berlaku seperti GSB ataupun KDB, KLB yang diperbolehkan. Jika keadaan seperti ini terjadi pada 35% dari luasan kawasan tentu saja akan memberi kesan kumuh karena kawasan berkembang tanpa perencanaan yang baik. Akan tetapi menurut persepsi masyarakat, rumah dianggap sudah memenuhi syarat asalkan mereka dapat berteduh dan dapat beristirahat sudah dianggap cukup. Untuk kawasan Tepian Sungai terbentang dari pasar besar hingga dermaga Puruk cahu dan sekitarnya yang merupakan Desa Beriwit masuk pada kategori kumuh.

b. Faktor Status Kepemilikan Hunian

Dari hasil analisis regresi yang dilakukan terhadap status kepemilikan hunian diperoleh hasil bahwa faktor ini mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap terbentuknya kawasan kumuh

Tepian Sungai Barito dari daerah pasar hingga dermaga Puruk Cahu. Menurut masyarakat jika suatu rumah dengan status sewa kebanyakan penghuninya tidak mempedulikan keadaan atau kondisi hunian yang mereka sewa. Sehingga jika terjadi kerusakan pada hunian tersebut, penghuninya tidak mempedulikannya karena merasa hal itu bukan tanggung jawabnya. Tentu saja semakin lama hunian tersebut kondisinya semakin buruk karena tidak dipelihara.

Apalagi menurut pengamatan, di kawasan pasar besar ini banyak sekali pendatang yaitu para pedagang temporer (boro) yang hanya tinggal sementara waktu karena memiliki usaha di kawasan perdagangan maupun di pasar yang terletak tak jauh dari Dermaga. Tentu saja hal ini akan berpengaruh terhadap lingkungan pada kawasan Pasar sampai Dermaga menjadi rendah.

c. Faktor Penghasilan

Secara ekonomis, dengan kondisi perekonomian yang relatif sedang dan rendah, dimungkinkan kemampuan masyarakat penghuni untuk merealisasikan perbaikan lingkungan huniannya masih kurang. Kebutuhan pemenuhan kelangsungan hidup, seperti sandang dan pangan merupakan prioritas utama penghuni dalam mengalokasikan pengeluaran dari pendanaan yang mereka peroleh. Dipandang dari sisi "gaya hidup" yang tergolong sederhana/apapun adanya, maka dengan kondisi kehidupan yang notabene berada pada lingkungan yang kurang terawat dan kumuh sudah

memberikan kenyamanan dan kepuasan bagi para penghuni untuk menempati lingkungan semacam itu (terbiasa dalam suasana pasar dan dermaga).

d. Faktor Luasan Lahan

Walaupun tempat tinggal mereka rata-rata dihuni dibawah standar, mereka tidak merasa terganggu. Karena mereka sudah merasa menjaga kebersihan tempat tinggal mereka, maka masyarakat beranggapan bahwa kekumuhan yang terjadi pada kawasan Pasar hingga Dermaga ini bukan dari faktor luas lahan. Ketidaknyamanan tempat tinggal yang terjadi hanya berdampak pada faktor sosial saja tidak mempengaruhi terjadinya kekumuhan suatu kawasan

e. Faktor Lama Tinggal

Faktor lama tinggal merupakan faktor yang berpengaruh cukup kuat terhadap terjadinya kekumuhan suatu kawasan Dimana sebagian kecil saja dari masyarakat yang tinggal dengan status sewa rumah merupakan faktor yang berpengaruh cukup kuat terhadap kekumuhan. Jika yang menyewa rumah dalam waktu yang lama atau lebih dari 5 tahun tentu saja tidak akan mengabaikan pemeliharaan hunian mereka, akan tetapi banyak juga kaum boro dan atau transit dari dermaga yang menyewa kamar hanya untuk waktu yang singkat, biasanya tarif sewa mereka

adalah per hari. Jadi tentu saja yang menempati kamar atau rumah sewa tersebut berganti-ganti atau tidak tetap.

f. Faktor Kepadatan Penduduk

Kepadatan pada kawasan Pasar Dermaga Puruk Cahu ini termasuk kawasan padat. Menurut Drs. Khomarudin, MA salah satu sebab yang mengakibatkan kawasan menjadi kumuh adalah kepadatan penduduk yang tinggi. Akan tetapi menurut hasil analisis regresi diperoleh bahwa faktor kepadatan penduduk di kawasan ini bukan merupakan faktor yang berpengaruh kuat terhadap terjadinya kawasan kumuh. Faktor ini mempunyai pengaruh yang rendah terhadap kekumuhan. Jadi menurut persepsi masyarakat padatnya penduduk di kawasan ini bukanlah merupakan sebab utama dari kekumuhan. Seperti telah diuraikan di atas bahwa di kawasan permukiman ini banyak pendatang yang hanya menetap sementara atau temporer (boro) dan menurut persepsi masyarakat bahwa pendatang ini tidak termasuk penduduk yang dimaksud dalam kepadatan penduduk. Disamping itu juga semakin banyak penduduk yang tinggal tidaklah mempengaruhi atau mengganggu kenyamanan tempat tinggal mereka, karena masyarakat masih masih memegang adat huma betang artinya kebersamaan (di satu ruang banyak beragam penghuni). Padahal justru pendatang inilah yang besar pengaruhnya terhadap kualitas lingkungan kawasan permukiman Pasar-Dermaga ini. (Mardhani, 2012)

3. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Upaya Penanganan Permukiman Kumuh

Dari berbagai program penanganan permukiman kumuh yang telah diterapkan di Indonesia, beberapa di antaranya telah mengusahakan untuk mengikutsertakan masyarakat penghuni kawasan kumuh tersebut, bahkan beberapa dari mereka menempatkan masyarakat sebagai aktor utama atau penyelenggara. Pemerintah hanya sebagai *enabler* atau *fasilitator* sehingga konsepsi pemberdayaan (*empowerment*) dapat terselenggara dengan baik. Melalui kalaborasi pemerintah bersama dengan masyarakat membuktikan bahwa jalinan penanganan permukiman kumuh berjalan lebih efektif karena manfaat terselenggaranya program-program penanganan permukiman kumuh yang berbasis komunikasi (*community based*) tersebut dirasakan dan dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.

Pemberdayaan merupakan salah satu langkah dalam upaya meningkatkan kapasitas masyarakat dan bentuk partisipasi dalam program penanganan permasalahan permukiman kumuh. Dalam segi ketataruangan, partisipasi masyarakat terbagi dalam beberapa tingkatan berdasarkan unit spasialnya yang dikemukakan oleh Doxiadis (1968) dalam Darmawan (2006).

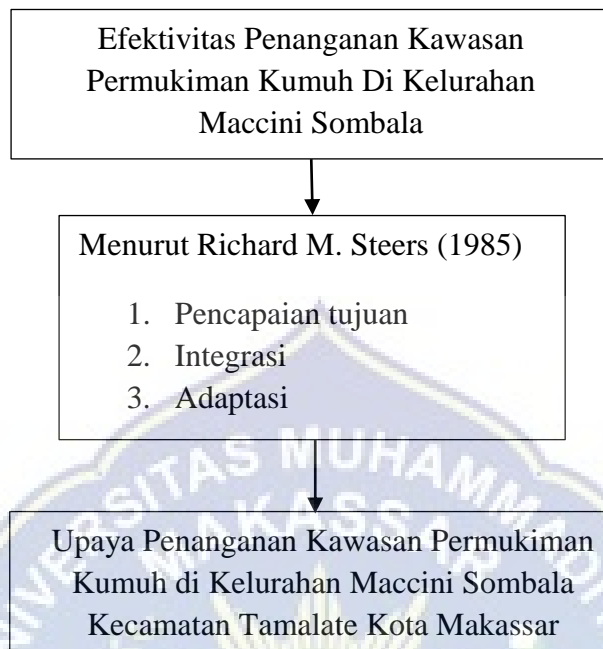
Keikutsertaan masyarakat khususnya penghuni kawasan permukiman kumuh dalam penanganan permukiman kumuh perlu di angkat secara nasional, mulai dari perencanaan, pengimplementasian,

pendanaan, serta *monitoring* dan evaluasi sebagai langkah pembelajaran mengenai sikap tanggung jawab untuk menjaga kondisi pascapenerapan program tersebut. Tantangan dari *community based* ini terletak apa sumberdaya dan kapasitasnya. Beberapa penghuni kawasan kumuh adalah masyarakat miskin yang secara *des sein* merupakan masyarakat yang kurang aktif, kurang inovasi, kurang cerdas, dan kurang tanggap terhadap peliknya permasalahan yang mereka alami. Pemberdayaan dan meningkatkan kapasitas untuk mengelola sumber daya, baik alam maupun manusia, menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menggiatkan program penanganan permukiman kumuh. Hal ini diupayakan agar warga penghuni kawasan kumuh tersebut mampu bertindak di suatu saat nanti sebagai *problem solver* tanpa adanya campur tangan dari pihak luar dan upaya menengkasakan kawasannya di mata sosial. Kalaupun ada, hanya sekedar bertindak sebagai fasilitator untuk memudahkan kinerja masyarakat dalam meningkatkan kualitas permukimannya.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan penjelasan terhadap hal-hal yang menjadi objek permasalahan dan disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan oleh karena itu penggambaran kerangka pikir harus jelas agar mudah di pahami. Adapun gambaran kerangka pikir sebagai berikut:

Bagan Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

D. Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penanganan kawasan pemukiman kumuh di Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Dengan menggunakan indikator pendukung menurut Richard M. Steers di mana ada tiga konsep yaitu: pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian maka di kemukakan deskripsi fokus penelitian yaitu:

1. Pencapaian tujuan

Pencapaian tujuan yang diharapkan agar berkurangnya permukiman kumuh di Kelurahan Maccini Sombala serta sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah di Wilayah Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate Kota Makassar dalam rangka penanganan kawasan permukiman kumuh.

2. Integrasi

Agar berkurangnya permukiman di harapkan terlebih dahulu adanya sosialisasi dari pemerintah setempat tentang apa yang dilakukan terlebih dahulu dalam mengatasi permukiman kumuh agar lebih berkurangnya permukiman kumuh.

3. Adaptasi

Pemerintah diharapkan dapat beradaptasi terlebih dahulu kepada masyarakat untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan dalam penanganan permukiman kumuh. Dengan beradaptasi pemerintah dapat menyalurkan saran-saran serta bantuan kepada masyarakat, termasuk masyarakat dapat menyalurkan keluhan-keluhannya kepada pemerintah dalam menangani permukiman kumuh agar menjadi berkurang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian yang di butuhkan pada penelitian ini kurang lebih selama 2 bulan (April-Mei) Tahun 2023 yang berlokasi penelitian dilakukan di Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate Kota Makassar.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang temuan-temuannya tidak di peroleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan tujuan mengungkapkan gejala secara holistic kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. (Sugiarto , 2015:8)

Adapun jenis tipe penelitian bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan bukan eksperimen, karena tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tentu tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variable, gejala, atau keadaan. Adapun tujuan dari penelitian deskripsi ini adalah memberi gambaran mengenai situasi-situasi, atau fakta secara akurat mengenai penanganan kawasan pemukiman kumuh di Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate (Himawati 2017:88)

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung di peroleh oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya atau langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Adapun data yang di dapatkan hasil observasi dan hasil wawancara yang dilakukan pada responten yaitu kepala keluarga yang menempati wilayah tersebut khususnya di Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate. Tujuannya untuk apakah penanganan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Maccini Sombala telah evktif. (Hikmawati 2017:33)

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, seperti lewat orang lain atau dokumen. Dimana data sekunder diperoleh di berbagai media seperti majalah, koran, buku, jurnal dan dokumentasi lain yang berhubungan dengan penelitiin Efektivitas Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate.

D. Informan Penelitian

Adapun Informan dalam penelitian ini adalah orang yang didasarkan pada kemampuan dan pengalamannya untuk memberikan informasi terkait dengan Efektifitas Penanganan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Informan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Informan

No	Nama	Inisial	Jabatan	Jumlah/Orang
1.	Rani Muliana Delima S.T, Md	RMD	Analisis Penertiban Pemanfaatan Ruang	1
2.	Idul	I	Kepala Seksi Kebersihan	1
3.	Sri Arsanti S.pd	S	Staf Ekbang	1
4.	Ana	A	Masyarakat	1
5.	Rohma	R	Masyarakat	1
Total Informan				5

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari peneliti adalah mendapatkan data. Sugiyono (2007:209) bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Namun dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan melalui tiga metode, yaitu:

1. Observasi

Observasi bertujuan untuk mengamati subjek penelitian, sehingga peneliti dapat memahami kondisi yang sebenarnya. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu penamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.

2. Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2019), wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dengan wawancara maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang informan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. Dalam melakukan wawancara, Peneliti menyiapkan instrumen penelitian berupa pernyataan-pernyataan tertulis untuk diajukan, dan tercatat apa yang dikemukakan oleh informan, oleh karena itu jenis-jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti termasuk kedalam jenis wawancara terstruktur.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang (Sugiyono 2019). Hasil dari penelitian observasi atau wawancara akan lebih kredibel kalau didukung oleh dokumen-dokumen yang bersangkutan.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan

melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap subpokok permasalahan.

3. Kesimpulan atau verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, dan perbedaan. (Siyoto Sodik, 2015).

G. Teknik Keabsahan Data

Salah satu cara paling penting dan mudah dalam uji keabsahan hasil penelitian adalah dengan melakukan data triangulasi, teknik pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Menurut Sugiyono (2021) agar dapat penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai peneliti ilmiah maka perlu

diadakan uji keabsahan data. Adapun teknik pengujian keabsahan data adalah sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah melakukan pengecekan data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil wawancara dengan dokumen-dokumen yang diperoleh penelitian dilapangan.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara menguji kredibilitas data yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh melalui wawancara akan dilakukan pengecekan menggunakan teknik observasi.

3. Triangulasi Waktu

Digunakan untuk keabsahan data yang berkaitan dengan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Karena fenomena-fenomena dilapangan bisa berubah kapan saja.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Kondisi Geografi Kota Makassar

Makassar adalah ibu Kota dari Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak tepat pada koordinat 119°24'17'38" BT dan 5°8'6'19" LS. Kota Makassar sempat berganti nama menjadi kota Ujung Pandang, namun akhirnya kembali lagi menjadi kota Makassar karena dianggap nama kota Makassar jauh lebih kuat dan kental akan histori.

Kota Makassar memiliki iklim tropis sebagaimana wilayah Indonesia pada umumnya. Suhu di Makassar berkisar antara 26 derajat celcius sampai 29 derajat celcius. Secara umum, curah hujan tertinggi di kota Makassar jatuh pada bulan Desember, Januari, Februari, Maret dan November. Kota Makassar memiliki 14 Kecamatan, berikut dibawah ini adalah daftar Kecamatan yang terdapat di kota Makassar, diantaranya:

Tabel 4.1 Daftar Nama Kecamatan di Kota Makassar

NO	NAMA KECAMATAN DIKOTA MAKASSAR
1.	Biringkanaya
2.	Bontoala
3.	Makassar
4.	Mamajang
5.	Manggala
6.	Mariso

7.	Panakkukang
8.	Rappocini
9	Tallo
10.	Tamalanrea
11.	Tamalate
12.	Ujung Pandang
13.	Ujung Tanah
14.	Wajo

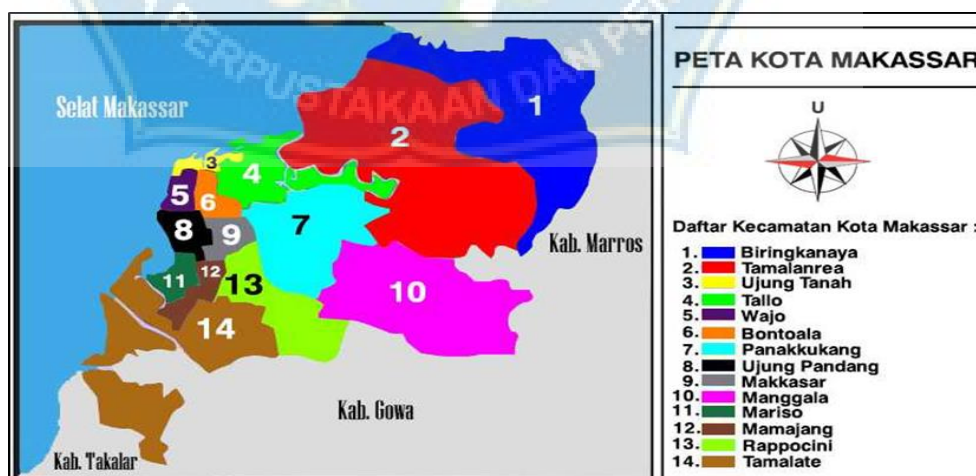
Adapun batas wilayah administratif dari kota Makassar adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kota Makassar berbatasan dengan Kabupaten Maros

Sebelah Timur : Dari Kota Makassar dengan Kabupaten Maros

Sebelah Selatan: Dari Kota Makassar berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar

Sebelah Barat : Dari Kota Makassar berbatasan dengan Selat Makassar



Gambar 4. 1 Peta Kota Makassar

2. Gambaran Umum Permukiman Kumuh Di Wilayah Kota Makassar

Secara geografis Kota Makassar memiliki posisi strategis karena berada pada persimpangan jalur lintas balik utara ke selatan mampu dari barat ke timur. Dengan posisi ini Kota Makassar berada dalam titik koordinat $199^{\circ} 18' 30, 18''$ sampai dengan $199^{\circ} 32' 31,03''$ BT dan $5^{\circ}.00'.30,18''$ dan $5^{\circ}14' 6,49''$ LS serta terletak di Pantai Barat Pulau Sulawesi Selatan. Kota Makassar mempunyai luas wilayah seluruh jumlah 17577,0 Ha atau 175,77 Km², yang terdiri dari perbukitan dan panta dengan jumlah penduduk sebanyak kurang lebih 1.369,606 jiwa.

Pada bagian Utara terdiri dari Kecamatan Biringkanayya, Tamalanrea, Tallo, dan Ujung Tanah, Di bagian selatan terdiri dari Kecamatan Tamalate dan Rappocini. Di bagian timur terdiri dari Kecamatan Manggala dan Panakkukang. Di bagian barat terdiri dari Kecamatan Wajo, Bontoala, Ujung Pandang, Makassar, Mamajang, dan Mariso. Wilayah Kota Makassar terdiri dari 14 kecamatan dan 143 kelurahan.

Menurut data Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh Kota Makassar luasan sebar permukiman kumuh Kota Makassar seluruhnya sebesar 428,46 Ha yang Tersebar di Empat Belas Kecamatan di seluruh wilayah Kota Makassar. Luas daerah kumuh yang lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2 Luas Daerah Kumuh berdasarkan Kecamatan di Kota Makassar

NO	Kecamatan	Luas Daerah Kumuh(Ha)	Penduduk di Daerah Kumuh (Jiwa)
1.	Mariso	20,35	5.986
2.	Mamajang	12,5	2.854
3.	Tamalate	75,76	85.87
4.	Rappocini	17	2.387
5.	Makassar	14,13	3.209
6.	Ujung Pandang	5,66	2.763
7.	Wajo	0,83	223
8.	Bontoala	14,9	3.765
9.	Ujung Tanah	5,66	2.763
10.	Tallo	102,98	18.579
11.	Panakkukang	60,79	11.435
12.	Manggala	21,9	2.219
13.	Birigkanayya	5,91	646
14.	Tamalanrea	70,09	1.958
	Jumlah	428,46	67.374

Sumber: Data Peningkatan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Makassar Prioritas 2022

Besaran luas masing-masing Kecamatan Mariso 20,35 Ha, Kecamatan Mamajang 12,5 Ha, Kecamatan Tamalate 75,76 Ha, Kecamatan Rappocini 17 Ha, Kecamatan Makassar 14,13 Ha, Kecamatan Ujung Pandang 5,66 Ha, Kecamatan Wajo 0,83 Ha, Kecamatan Bontoala 14,9 Ha, Kecamatan Ujung Tanah 5,66 Ha, Kecamatan Tallo 102,98 Ha, Kecamatan Panakkukang 60,79 Ha, Kecamatan Manggala 21,9 Ha, Kecamatan Biringkanayya 5,91 Ha, Kecamatan Tamalanrea 70,09 Ha. Luas kumuh terbesar terdapat di

Kecamatan Tallo dengan luas wilayah kumuh sebesar 102,98 Ha, dengan jumlah penduduk sebanyak 67.374 jiwa. Tampak dari sebaran kumuh di wilayah Kota Makassar, sebaran kumuh terluas berada pada titik Pesisir Kota, tengah kota dan daerah perbatasan.

Menurut data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Kota Makassar lokasi permukiman kumuh di Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate Kota Makassar luas daerah kumuh yang lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3 Luas Daerah Kumuh di Kelurahan Maccini Sombala

Kelurahan	RT/RW	Luas Daerah Kumuh(Ha)	Penduduk di Daerah Kumuh (Jiwa)	Tingkat Kekumuhan
Maccini Sombala	RT004-RW005	1,50	294	Kumuh Ringan
Maccini Sombala	RT006-RW005	2,24	82	Kumuh Ringan
Maccini Sombala	RT006-RW006	0,75	455	Kumuh Ringan
Jumlah		4,49	831	Kumuh Ringan

Sumber: Data Peningkatan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Makassar Priorotas 2022

3. Sejarah Singkat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar mulai terbentuk sejak tanggal 13 desember 2013 di dasari pada No 7

tahun 2013 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah No 3 Tahun 2009 tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah Kota Makassar akan berupaya mewujudkan visi misi Kota Makassar dalam sektor perumahan dan kawasan permukiman pemerintah daerah juga mewujudkan Makassar sebagai kota dunia, kemudian pada tahun 2016 perubahan nama perumahan dan kawasan permukiman pemerintah daerah menjadi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman sebagai perangkat organisasi daerah berdasarkan peraturan Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5887), Peraturan daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, Peraturan Walikota Makassar Nomor 86 Tahun 2016 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan Undang-Undang nomor 1 Tahun 2011 adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, Penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.

Berikut adalah tabel perumusan visi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar.

Tabel 4.4 Visi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar

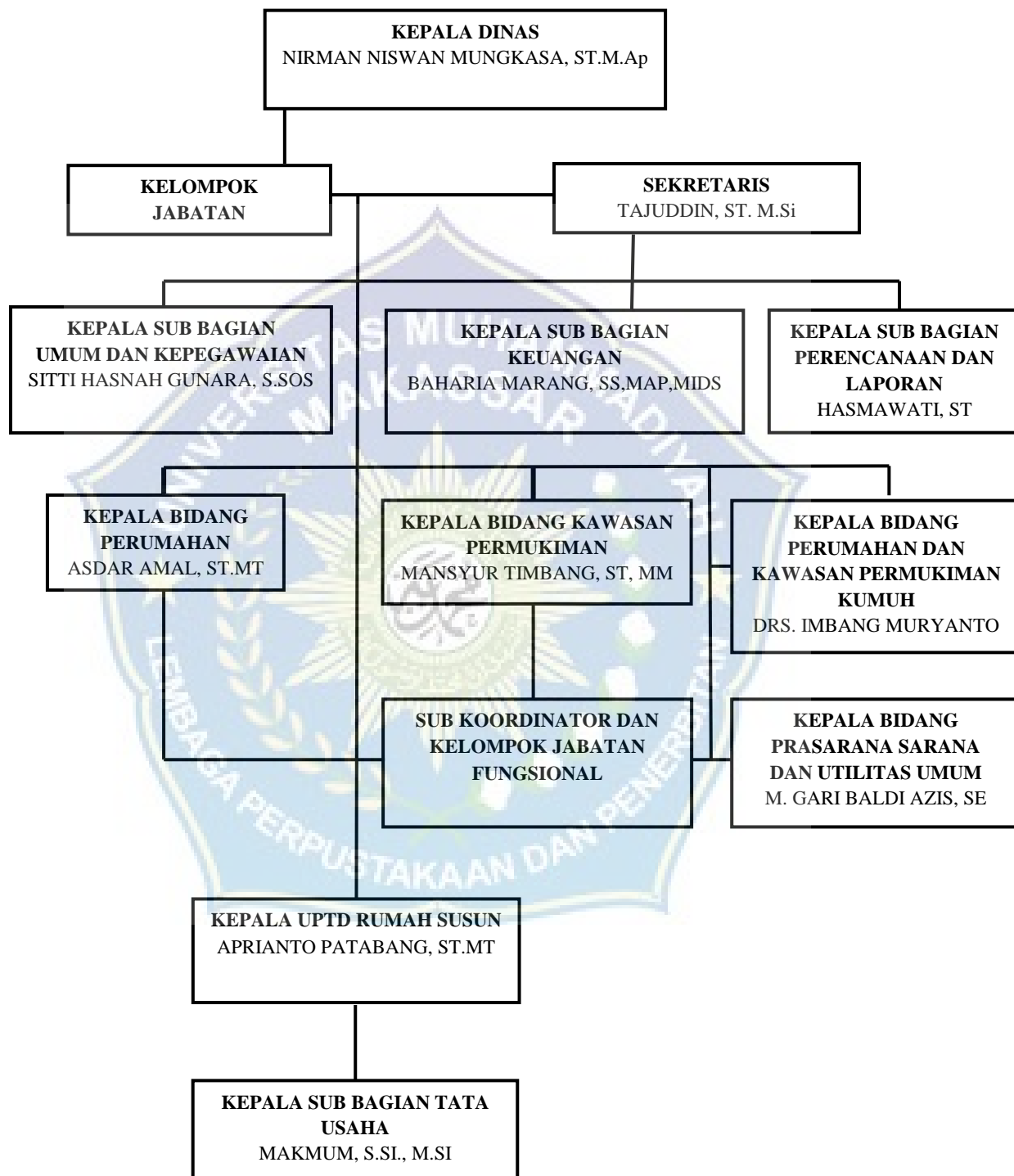
No	Perwujuan Visi	Pokok-Pokok Visi	Pernyataan Visi
1.	Pengembangan dan pemeliharaan prasarana dan sarana utilitas yang berkualitas.	Pembangunan berkawasan lingkungan	Terpenuhinya perumahan layak dan terjangkau yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas yang berwawasan lingkungan menuju kota dunia.
2.	Penataan lingkungan permukiman yang sehat dan nyaman		

Misi:

- a. Mengupayakan terwujudnya pemenuhan perencanaan perumahan dan kawasan permukiman yang baik sesuai standar.
- b. Mewujudkan lingkungan perumahan yang sehat dan aman.
- c. Mewujudkan kawasan permukiman yang berkualitas
- d. Mengupayakan ketersediaan rumah tidak layak huni yang terjangkau.
- e. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan dan pengelolaan perumahan dan kawasan permukiman.

Sruktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kota Makassar



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

B. Hasil Penelitian

Kawasan permukiman kumuh adalah sebuah kawasan dengan tingkat kepadatan populasi di sebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat yang kurang mampu. Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni atau pakai karena ketidak teraturan bangunan, tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Dan masyarakat di daerah tersebut kurang berdaya dalam, segi keuangan, ataupun pengetahuan, masyarakat di kawasan permukiman kumuh bias di katakan tidak berdaya dalam segi ekonomi, dan tidak berdaya dalam segi finansial, dan tidak berdaya dalam segi ilmu pengetahuan. Keberdayaan itu disebabkan karena keadaan yang terpaksa sehingga masyarakat di Kota Makassar masih tetap tinggal di kawasan permukiman kumuh. Dan permukiman kumuh antara lain di sebabkan karena keterbatasan kemampuan akses lokasi sehingga turun temurun dari waktu ke waktu. Salah satu pemukiman kumuh yang ada di Kota Makassar yaitu terletak di Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate Kota Makassar.

Di Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate masih terdapat permukiman kumuh salah satunya terletak di Jl. Deppasawi dalam RT5,RW5. Maka penelitian berfokus pada Efektivitas Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh. Maka Peneliti akan berfokus pada tahapan Efektivitas menurut Richard M. Steers 1985: Pencapaian Tujuan, Integrasi, Adaptasi.

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang harus dipandang sebagai suatu proses. Dalam hal ini pencapaian tujuan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga tercapainya suatu tujuan yang di harapkan dalam efektivitas penanganan permukiman kumuh. Berdasarkan hasil wawancara langsung yang di lakukan oleh peneliti terhadap beberapa informan, maka di peroleh beberapa informasi atas wawancara peneliti yang dilakukan sebagai berikut:

Sebagaimana hasil wawancara dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar yaitu selaku Analis Penertiban Pemanfaatan Ruang yang mengatakan bahwa :

“Kami berupaya dan bertujuan untuk melakukan penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate salah satunya memberikan bantuan ke pada masyarakat berupa sembako, dan bahan bangunan, tetapi bantuan berupa bahan bangunan itu di lakukan secara beransur atau bertahap, dengan adanya bantuan ini kami berharap agar mengurangi permukiman kumuh”.
(Hasil wawancara dengan RMD , Tanggal 11 April 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di ketahui pencapaian tujuan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Pawasan Permukiman Kota Makassar yaitu bertujuan untuk melakukan penanganan pemukiman kumuh. Sejalan dengan itu hasil wawancara Staf Kelurahan bagian Kepala Seksi Kebersihan dengan itu hasil wawancara yang mengatakan bahwa :

“Kami juga dari Kelurahan melakukan kerja sama dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mencapai tujuan mengurangi perumahan kumuh salah satu bentuk kerja sama yang dilakukan dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam

hal mengurangi permukiman kumuh dan di beri bantuan berupa sembako dan bahan bangunan secara bertahap”.
(Hasil wawancara dengan I, Tanggal 03 Mei 2023)

Untuk mengetahui benar atau tidaknya penanganan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Kelurahan Maccini Sombala peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat di Kecamatan Tamalate Kelurahan Maccini Sombala RT5 RW5 yang mengatakan bahwa:

“Benar adanya bantuan berupa sembako seperti beras dan bahan pokok makanan yang di berikan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh dan Kelurahan , dan benar adanya bantuan bahan bangunan seperti atap rumah berupa seng dan semen”.
(Hasil wawancara dengan A, Tanggal 07 Mei 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa pencapaian tujuan yang hendak di capai oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Kelurahan Maccini Sombala yaitu mengurangi permukiman kumuh dengan cara memberikan sembako atau bahan pokok makanan dan memberika bantuan berupa bahan bangunan secara bertahap kepada masyarakat.

2. Integrasi

Integrasi adalah tindakan menyatukan komponen yang lebih kecil ke dalam satu sistem yang berfungsi sebagai satu. Dalam hal ini integrasi adalah sosialisasi yang di lakukan oleh pemerintah, salah satu sosialisasi yang di lakukan oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Kelurahan yaitu sosialisasi tentang sampah seperti jangan membuang sampah sembarangan dan sosialisasi tentang bantuan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar yaitu selaku Analis Penertiban Pemanfaatan Ruang yang mengatakan bahwa :

“Kami melakukan integrasi dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat di permukiman kumuh, sosialisasi yang kami lakukan yaitu sosialisasi tentang sampah dimana masyarakat dilarang untuk membuang sampah sembarangan agar lingkungan menjadi bersih dan tidak terlihat kotor, selain sosialisasi tentang sampah kami juga melakukan sosialisasi tentang bantuan berupa sembako kepada masyarakat dalam hal ini masyarakat harus antri jika ingin mendapatkan bantuan sembako”
(Hasil wawancara dengan RMD, tanggal 11 April 2023)

Sejalan dengan yang dikatakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar, adapun hasil wawancara dengan Staf Kelurahan Maccini Sombala bagian Kepala Seksi kebersihan yaitu:

“Sejalan dengan yang di katakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, kami selaku Kelurahan melakukan juga integrasi dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat, sosialisasi yang kami lakukan yaitu mengenai kebersihan lingkungan, dimana masyarakat di beritahukan untuk tidak membuang sampah sembarangan agar lingkungan terlihat menjadi bersih dan tidak terlihat kumuh”
(Hasil wawancara dengan I, Tanggal 3 April 2023)

Selanjutnya untuk mengetahui benar atau tidaknya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar dan Kelurahan Maccini Sombala, peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat di Kecamatan Tamalate Kelurahan Maccini Sombala RT5 RW5 yang mengatakan bahwa :

“Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Kelurahan tidak pernah mengadakan sosialisasi kepada kami selaku masyarakat, baik itu sosialisasi mengenai sampah ataupun sosialisasi lainnya”
(Hasil wawancara dengan A, Tanggal 07 Mei 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat di simpulkan integrasi yang dilakukan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar dan Kelurahan Maccini Somabala mereka mengatakan adanya sosialisasi tentang sampah dan kebersihan lingkungan akan tetapi realitanya di masyarakat tidak ada satupun sosialisasi yang dilakukan.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah penyesuaian diri yang dilakukan makhluk hidup terhadap lingkungannya sebagai bentuk pertahanan diri. Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Dalam hal ini adaptasi yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar yaitu selaku Analis Penertiban Pemanfaatan Ruang turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi lingkungan sekitar berikut ini hasil wawancara yang mengatakan bahwa :

“Adaptasi yang kami lakukan selaku Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melakukan pengecekan ke lokasi permukiman kumuh sekaligus melihat kondisi masyarakat dengan beradaptasi melalui adanya berbincangan agar memudahkan kami bisa mengetahui keluhan masyarakat yang ada di permukiman kumuh”.
(Hasil wawancara dengan RMD, Tanggal 11 april 2023)

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat di simpulkan adaptasi yang di lakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar dengan melakukan pengecekan ke lokasi permukiman kumuh.

Senada dengan itu adapun hasil wawancara Staf Kelurahan bagian Kepala Seksi Kebersihan dengan itu hasil wawancara yang mengatakan bahwa:

“Adaptasi yang kami lakukan ke masyarakat dengan pengunjungan dan pengecekan lokasi, dengan adanya adaptasi yang dilakukan ini kami berharap masyarakat lebih bisa menerima masukan-masukan seperti jangan membuang sampah sembarangan, kami berharap dengan adanya adaptasi ini masyarakat lebih menjaga kebersihan”.
(Hasil wawancara dengan I, Tanggal 03 April 2023)

Untuk mengetahui benar atau tidaknya Adaptasi yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar dan Kelurahan Maccini Sombala peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat di Kecamatan Tamalate Kelurahan Maccini Sombala RT5 RW5 yang mengatakan bahwa :

“Benar adanya kunjungan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Kelurahan, kami merasa senang dengan adanya kunjungan tersebut karena pemerintah masih memperhatikan masyarakat disini sekaligus bisa berinteraksi langsung dengan pemerintah dan bisa menyampaikan langsung keluhan-kesal yang kami alami”
(Hasil wawancara dengan A, tanggal 07 Mei 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat di simpulkan Adaptasi yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar dan Kelurahan Maccini Sombala mengatakan melakukan kunjungan atau pengecekan lokasi secara langsung kepada masyarakat sekaligus melihat kondisi masyarakat yang berada permukiman kumuh.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pencapaian Tujuan

Berdasarkan teori Menurut Richard M. Steers mengemukakan Pencapaian Tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus

dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Terkait dengan teori tersebut berdasarkan hasil penelitian dan wawancara oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Kelurahan Maccini Sombala untuk mengurangi permukiman kumuh melalui pemberian sembako dan bahan bangunan kepada masyarakat. Bentuk bantuan yang diberikan tidak dapat meningkatkan efektivitas penanganan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Kelurahan Maccini Sombala atau belum sejalan dimana jika dikaitkan dengan teori pencapaian tujuan dari pembahasan di atas pemberian sembako tidak akan mengurangi permukiman kumuh, yang seharusnya dilakukan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar dan Kelurahan Maccini Sombala yaitu melakukan edukasi, serta memberikan fasilitas umum berupa WC dan memberikan bantuan berupa tempat sampah, cat. Dengan pemberian fasilitas tersebut lebih efektif dalam menangani permukiman kumuh dibandingkan masyarakat hanya diberi sembako.

2. Integrasi

Berdasarkan teori Menurut Richard M. Steers mengemukakan Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan consensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya, integrasi menyangkut proses sosialisasi. Terkait dengan teori tersebut berdasarkan hasil penelitian dan

wawancara penelitian integrasi yang dimaksud yaitu berupa sosialisasi. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar dan Kelurahan Maccini Sombala mengatakan adanya sosialisasi yang dilakukan yaitu mengenai sampah dan kebersihan lingkungan, tetapi realita yang ada di lapangan tidak sesuai dengan yang dikatakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar dan Kelurahan Maccini Sombala tidak ada satupun sosialisasi yang pernah dilakukan berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat disana.

3. Adaptasi

Berdasarkan teori Menurut Richard M. Steers mengemukakan Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja. Adaptasi adalah cara organisme dalam mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup. Organisme yang bisa beradaptasi terhadap lingkungannya mampu untuk memperoleh air, udara dan nutrisi. Terkait dengan teori tersebut berdasarkan hasil penelitian dan wawancara penelitian sudah tersinkronisasikan atau sudah sejalan dimana, adaptasi yang dilakukan yaitu oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar dan Kelurahan Maccini Sombala adanya kunjungan atau pengecekan lokasi secara langsung kepada masyarakat sekaligus melihat kondisi masyarakat yang berada permukiman kumuh.

Berdasarkan data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar luasan sebar permukiman kumuh pada Tahun 2021 yang tersebar

di Empat Kecamatan di seluruh wilayah Kota Makassar. Luas daerah kumuh dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.5 Luas Daerah Kumuh berdasarkan Kecamatan di Kota Makassar

No	Kecamatan	Luas Daerah Kumuh(Ha)	Penduduk di Derah Kumuh (Jiwa)
1.	Mariso	11,78	1.798
2.	Mamajang	12,50	1.249
3.	Tamalate	75,76	6.227
4.	Rappocini	15,34	3.333
5.	Makassar	10,66	2.175
6.	Ujung Pandang	18,81	3.185
7.	Wajo	0,83	269
8.	Bontoala	32,49	6.843
9.	Tallo	85,25	30.552
10.	Panakkukang	60,79	4.824
11.	Manggala	19,72	1.983
12.	Biringkanayya	17,64	1.203
13.	Tamalanrea	36,05	2.983
14.	Ujung Tanah	5,91	3.527
Jumlah		463,65	69.332

Sumber: Data Peningkatan Perumahan Kumuh dan Permukiman

Kumuh Kota Makassar Prioritas 2021

Berdasarkan luas masing-masing Kecamatan Mariso 11,78 Ha, Kecamatan Mamajang 12,50 Ha, Tamalate 75,76 Ha, Rappocini 15,34 Ha, Makassar 10,66 Ha, Ujung Pandang 18,81 Ha, Wajo 0,83 Ha,

Bontoala 32, 49 Ha, Tallo 85, 25 Ha, Panakkukang 60, 79 Ha, Manggala 19,72 Ha, Biringkanaya 17, 64 Ha, Tamalanrea 36, 05 Ha, Ujung Tanah 5, 91 Ha. Dengan jumlah penduduk sebanyak 69.332 jiwa. Tampak dari sebarang kumuh di wilayah kota Makassar, sebaran kumuh terluas berada pada titik Pepesir Kota, tengah Kota dan Daerah perbatasan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang ada dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Kamalate Kota Makassar, belum berjalannya efektif karena berdasarkan hasil temuan peneliti tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan dan bantuan yang diberikan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman belum bisa dikatakan mengurangi permukiman kumuh yang ada di Kelurahan Maccini Sombala. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis yang menggunakan 3 indikator menurut Richard M. Steers :

1. Pencapaian tujuan pencapaian tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar dan Kelurahan Maccini Sombala untuk mengurangi permukiman kumuh, dengan memberikan bantuan berupa sembako dan bahan bangunan kepada masyarakat. Belum bisa dikatakan efektif karena Pemberian sembako tidak akan mengurangi permukiman kumuh, yang seharusnya dilakukan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar dan Kelurahan Maccini Sombala yaitu melakukan edukasi, serta memberikan fasilitas umum berupa WC dan memberikan bantuan berupa tempat sampah, cat. Dengan pemberian fasilitas tersebut lebih efektif dalam menangani pemukiman kumuh di bandingkan masyarakat hanya diberi sembako.

2. Integrasi yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Kota Makassar dan Kelurahan Maccini Sombala berupa sosialisasi mengenai sampah dan kebersihan lingkungan, akan tetapi realita yang ada di lapangan tidak ada satupun sosialisasi yang dilakukan. Jadi tidak efektif.
3. Adaptasi yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar dan Kelurahan Maccini Sombala dengan adanya kunjungan atau pengecekan lokasi secara langsung kepada masyarakat sekaligus melihat kondisi masyarakat yang berada permukiman kumuh. Jadi bisa di katakana sudah efektif.

B. Saran

Berkenaan dengan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka penulis juga akan memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar dan Kelurahan Maccini Sombala sebaiknya meningkatkan penanganan yang dilakukan agar efektivitas penanganan kepada masyarakat lebih baik. Dan pencapaian tujuan penanganan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate Kota Makassar di nilai masih kurang efektif sehingga perlu adanya tindakan atau penanganan lebih lanjut ke masyarakat dengan penambahan sarana dan prasarana dalam bentuk penyediaan tempat sampah dan perbaikan jalanan harus segera di perbaiki agar berkurangnya permukiman kumuh di Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate, karena itu sangat penting, sebab berkaitan dengan kesehatan masyarakat dengan adanya penanganan dari pemerintah juga bisa lebih memperhatikan masyarakat terutama warga yang tinggal di kawasan permukiman kumuh.
2. Perlunya pemerintah mengadakan integrasi berupa sosialisasi guna mengatasi agar lebih berkurangnya permukiman kumuh, sosialisasi yang dapat dilakukan yaitu menjaga lingkungan yang sehat dengan adanya

kegiatan ini agar memberikan masukan atau arahan kepada masyarakat untuk menjaga lingkungan agar menjadi lebih baik.



DAFTAR PUSTAKA

- B.P. (2016). Skema inovatif penanganan permukiman kumuh. Indonesia: Gadjah mada University Press
- Han, E. ., Goleman, D., Boyatzis, R., & Mckee, A. (2019). Konsep Dasar Efektivitas. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Ilyas, I. (2021). Efektivitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Disatuan Penyelenggara Administrasi Kepolisian Resort Kota Besar Makassar (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Khotimah, C., & Ellsadayna, T. N. (2014). Profil Lingkungan Kumuh Terhadap Perilaku Penghuni dalam Teori Ekologi-Bronfenbrenner (Studi Kasus di Permukiman Kumuh Pacar Keling Surabaya). *Personifikasi: Jurnal Ilmu Psikologi*, 5(2), 139-162.
- Lestari, L. (2021). Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Buntuna Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli. *Tolis Ilmiah: Jurnal Penelitian*, 3(1).
- Mardhani, M. (2012). Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Tepi Sungai Barito Puruk Cahu. *Jurnal Perspektif Arsitektur*, 7(2), 24–34.
- Nursan, & Kahar, F. (2019). Birokrat: jurnal ilmu administrasi publik issn : 2354-5925. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(2), 116–130.
- Putra, P. (2018). Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pada Masyarakat Di Kota Palu (Studi Tentang Kelompok Usaha Bersama). *Katalogis*, 6(8), 1-8.
- Rasyid, R., Agustang, A. T. P., Robo, T., Aryuni, V. T., & Sudjud, S. (2022). Analisis Karakteristik Lingkungan Permukiman Kumuh di Kelurahan Makassar Timur Kota Ternate. *Journal Lageografia*, 20(2).
- Rahayu, I., & Jaharuddin, W. A. (2020). Identifikasi Karakteristik Permukiman Kumuh Di Sekitar Taman Maccini Sombala Kota Makassar. *Teknosains: Media Informasi Sains dan Teknologi*, 14(2), 187-194.
- Siyoto Sodik. (2015). Dasar Metodologi Penelitian. Literasi Media Publishing.

Sugiyono, S. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta

Sanjaya, S. (2020). Efektivitas Program Area Traffic Control System (Atcs) Dalam Meminimalisir Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Bandung (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).

Tumewu, D., Mantiri, M., & Lopian, M. T. (2021). Efektivitas Pengelolaan Terminal Angkutan Umum Tipe B Amurang Kabupaten Minahasa Selatan. *Governance*, 1(2).



L

A

M

P

I

R

A

N



LAMPIRAN I PERSETUJUAN PENELITIAN

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Boulevard No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448206
 Website : <http://dpmptsp.sulawesiprov.go.id> Email : dpmptsp@elektron.go.id
 Makassar 90231

Nomor : 12991/S.01/PTSPP/2023 Kepada Yth.
 Lampiran : - Walikota Makassar
 Perihal : Izin penelitian

di
 Tempat

Berdasarkan surat Ketua LPSM UNISMUH Makassar Nomor : 825/05/C.4-VIII/III/1444/2023 tanggal 09 Maret 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dengan nama ini:

Nama : RAUDATUL JANNAH LAHYA
 Nomor Pokok : 105611119419
 Program Studi : Sarjana (S1)
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
 Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

"EFEKTIVITAS PENANGANAN KAWASAN PEMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN MACCINI SOMBALA KECAMATAN TAMALATE, KOTA MAKASSAR"

Yang akan dilaksanakan pada: Tgl. 10 Maret s/d 10 April 2023

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat ini penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di Makassar
 Pada Tanggal 10 Maret 2023

a.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

P. H. SULKAF S. LATIF, M.M.
 Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA
 Nip. 119030424.1989031 010

Tembusan Yth.
 1. Ketua LPSM UNISMUH Makassar di Makassar.
 2. Arsip.

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESESUATAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Ahmad Yani No.2 Makassar 90111
 Telp +62411 - 3616867 Fax +62411 - 3616867
 Email : kesbang@makassar.go.id Home Page : <http://www.makassar.go.id>

Makassar, 15 Maret 2023
 Kepada
 Yth. CAMAT TAMALATE
 KOTA MAKASSAR
 Di
 MAKASSAR

SURAT IZIN PENELITIAN
 Nomor : 070/ 620 -II/BKBP/III/2023

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 9)

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan nomor : 12991/S.01/PTSPP/2023 Tanggal 10 Maret 2023 perihal Izin Penelitian.

Setelah membaca maksud dan tujuan penelitian yang tercantum dalam proposal penelitian, maka pada prinsipnya Kami menyetujui dan memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : RAUDATUL JANNAH LAHYA
 NIM / Jurusan : 105611119419 / Ilmu Administrasi Negara
 Pekerjaan : Mahasiswa (S1) UNISMUH
 Tanggal pelaksanaan : 15 Maret s/d 10 April 2023
 Jenis Penelitian : Skripsi
 Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar
 Judul : "EFEKTIVITAS PENANGANAN KAWASAN PEMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN MACCINI SOMBALA KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR"

Demikian Surat Izin Penelitian ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Melalui Email Bidanghublabakesbangpolmke@gmail.com.

a.n. WALKOTA MAKASSAR
 KEPALA BADAN KESBANGPOL
 U.D.
 SEKRETARIS,


DR. HARISIP, S.H., M.H., M.Si., M.I.Kom
 Pangkat : Pembina Tingkat II/IV b
 Nip. 19730607.198311 1 001

Tembusan :

1. Walikota Makassar di Makassar (sebagai laporan).
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul – Sel di Makassar.
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar (sebagai laporan).
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. Sul Sel di Makassar.
5. Ketua LPSM UNISMUH Makassar di Makassar.
6. Mahasiswa yang bersangkutan.
7. Arsip.

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
KECAMATAN TAMALATE
Jalan Dasar Tanggung Utama No. 181 Makassar 90224
Email : kecamatantamalte09@gmail.com Home page :http://kecamatantamalte.com

Makassar, 03 April 2023

Nomor : 400/013/KT/IV/2023 Kepada
Sifat :
Lampiran : Yth, **Lurah Maccini Sombala**
Perihal : **Isia Penelitian** Di:
Makassar

Berdasarkan surat dari Kantor Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik,
Nomor : 070 / 630-II/BKBP/III/2023 Tanggal 15 Maret 2023, perihal tersebut
diatas maka dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa :

Nama : **RAUDATUL JANNAH LAHYA**
NIM/ Jurusan : 10561119419/ Ilmu Administrasi Negara
Alamat : Jl.Sultan Alauddin No.299 Makassar
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) UNISMULTI
Judul : **"EFEKTIVITAS PERANGKAPAN KAWASAN PEMUKIMAN
KUMUH DI KELURAHAN MACCINI SOMBALA
KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR"**
Pelaksanaan : 15 Maret s/d 10 April 2023

Bermaksud mengadakan Penelitian pada Wilayah Saudara dan pada
prinsipnya kami menyetujui, oleh sebab itu diharapkan Saudara memberikan
bantuan dan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan kepada Saudara untuk dimaklumi dan
selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya Kepada Camat Tamalate
Kota Makassar.

Makassar, 03 April 2023
An. Camat TAMALATE
A. W. S. AP
Pangkat : Pemata TK
Nip. 197006081992032010

Tembusan kepada Yth :
1. Mahasiswa yang bersangkutan
2. Peringat

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jl. Sultan Alauddin No. 309
MAKASSAR

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : <i>kec. tamalate</i>	Diterima Tanggal : <i>6-4-2023</i>
Tanggal Surat : <i>3-4-2023</i>	Nomor Agenda : <i>173</i>
Nomor surat : <i>400/013/KT/IV/2023</i>	Diteruskan kepada
<i>Isi Disposisi</i>	Sifat : 1. Segera 2. Biasa
<i>Kasubag Umpeg</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Sekretaris
<i>di Fasilitas Seni</i>	2. Kepala Bidang Perumahan
<i>Atas</i>	3. Kepala Bidang Kawasan Permukiman
<i>10/4/23</i>	4. Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
	5. Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas
	6. UPTD Rusunawa

10/6/4-23

LAMPIRAN II DOKUMENTASI WAWANCARA INFORMAN



Wawancara di kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Kota Makassar, dengan Ibu Rani Muliana Delima S.T, Md selaku Analis Pennertiban Pemanfaatan Ruang



Wawancara di Kantor Kelurahan Maccini Sombala , dengan Bapak Idul selaku Kepala Seksi Kebersihan.



Wawancara di Kantor Kelurahan Maccini Sombala , dengan Ibu St. Hawania selaku Staf Kelurahan dan Ibu Sri Arsanti S.pd selaku Staf Ekbang





Wawancara di Jl Deppasawi Dalam RT5 RW5 Kelurahan Maccini Sombala dengan Ibu Ana selaku Masyarakat



Wawancara di Jl. Deppasawi Dalam RT5 RW5 Kelurahan Maccini Sombala dengan Ibu Rohma selaku Masyarakat

**LAMPIRAN III LOKASI PERMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN
MACCINI SOMBALA**



Tampak Depan Rumah Permukiman Kumuh di Kelurahan Maccini Sombala





Akses jalanan yang kurang baik



Salah satu Rumah yang berada di Permukiman Kumuh

**LAMPIRAN IV DOKUMENTASI PEMBERIAN SEMBAKO DI KELURAHAN
MACCINI SOMBALA**



Pemberian sembako yang dilakukan oleh Kepala Kelurahan



Pemberian sembako yang dilakukan oleh Staf Kelurahan

**LAMPIRAN V SK PENETAPAN LOKASI PENCEGAHAN DAN
MENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH KOTA MAKASSAR TAHUN 2022**



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR :2821/648/TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH KOTA MAKASSAR
TAHUN 2022

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta dalam rangka menunjang pembangunan Kota Makassar demi meningkatkan kualitas lingkungan, perlu menetapkan lokasi pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kota Makassar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Penetapan Lokasi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Makassar Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);

- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teliti Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyediaan dan Penyernahan Prasarana, Sarana, Utilitas pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2011 Nomor 9);
- 14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Makassar Tahun 2015-2034 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2015 Nomor 4);
- 15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
- 16. Keputusan Walikota Makassar Nomor 1301/050.13/Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Makassar

Memperhatikan : Keputusan Walikota Makassar Nomor 1301/050.13/Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Makassar

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN LOKASI PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH KOTA MAKASSAR TAHUN 2022.
- KESATU** : Menetapkan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Makassar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Penetapan lokasi pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana di maksud pada Diktum KESATU ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan perbaikan infrastruktur lingkungan kegiatan perbaikan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 - b. hasil pendataan yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar dengan melibatkan partisipasi dan peran masyarakat;



- c. persiapan fasilitasi dan pendampingan;
- d. sebagai bahan review atas Sub Project Appraisal Report (SPAR) Kota Makassar; dan
- e. sebagai dasar penyusunan rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang merupakan komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024.

KETIGA : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 21 Agustus 2022.

WALI KOTA MAKASSAR,



Moh. Ramdhan Pomanto
MOH. RAMDHAN POMANTO

Tembusan ditunjukkan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar;
2. Inspektur Kota Makassar di Makassar;
3. Kepala Bappeda Kota Makassar di Makassar;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar di Makassar;
5. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar di Makassar;
6. Kepala Dinas Hukum Setda Kota Makassar di Makassar;
7. Masing-masing yang bersangkutan;
8. Bertinggal.



LAMPIRAN VI KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 2821/648/ TAHUN 2022

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 2821/648/ Tahun 2022
TENTANG
PENTABILISASI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUALITAS
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH KOTA MAKASSAR

DAFTAR LOKASI PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH KOTA MAKASSAR

NO	NAMA LOKASI (KAWASAN)	LINGKUP ADMINISTRASI				KEPENDUDUKAN		KEKORBATAN			KEKUALIFIKASIAN		PERUBAHAN LAJUR		LEGALITAS	TIPOLOGI KUMUH	KUALIFIKASI	PRIORITAS	
		KECAMATAN	KELOMPOKAN	RT/RW	LUAS (M ²)	Jumlah Jiwa	REPERKAWAN (Jumlah/ha)	UMUM	BUDUK	MLA	TINGKAT	MLA	TINGKAT						
1	Kawasan Das Jeneberang	TAMALATE	BALANG BANG	RT001-RW000	1,97	329	240	97110.8147	1192436.6047	30	ELAKUN RINGAN	9	SEDANG	LEGAL	DATARAN RENDAH	C1			
		TAMALATE	BALANG BANG	RT002-RW000	1,97	252	126	97110.8147	1192436.6047	20	ELAKUN RINGAN	9	SEDANG	LEGAL	DATARAN RENDAH	C1			
		TAMALATE	BALANG BANG	RT003-RW004	0,58	253	430	97090.9817	1192436.6047	20	ELAKUN RINGAN	9	SEDANG	LEGAL	DATARAN RENDAH	C1			
		TAMALATE	PAKANG TAMBUNG	RT001-RW007	2,26	368	288	971121.8147	1192436.6047	20	ELAKUN RINGAN	9	SEDANG	LEGAL & DUA TIERS AIR	DATARAN RENDAH	C4			
		TAMALATE	PAKANG TAMBUNG	RT002-RW011	2,64	352	380	971121.8147	1192436.6047	20	ELAKUN RINGAN	9	SEDANG	LEGAL & DUA TIERS AIR	DATARAN RENDAH	C4			
		TAMALATE	PAKANG TAMBUNG	RT003-RW007	1,26	483	880	971121.8147	1192436.6047	20	ELAKUN RINGAN	9	SEDANG	LEGAL	DATARAN RENDAH	C1			
		TAMALATE	PAKANG TAMBUNG	RT004-RW007	0,90	274	377	971121.8147	1192436.6047	20	ELAKUN RINGAN	9	SEDANG	LEGAL	DATARAN RENDAH	C1			
		TAMALATE	PAKANG TAMBUNG	RT005-RW007	0,99	342	340	971121.8147	1192436.6047	20	ELAKUN RINGAN	9	SEDANG	LEGAL	DATARAN RENDAH	C1			
		TAMALATE	PAKANG TAMBUNG	RT006-RW012	0,38	228	62	971121.8147	1192436.6047	17	ELAKUN RINGAN	9	SEDANG	LEGAL	DATARAN RENDAH	C1			
		TAMALATE	PAKANG TAMBUNG	RT007-RW007	1,87	714	397	971121.8147	1192436.6047	18	ELAKUN RINGAN	9	SEDANG	LEGAL & DUA TIERS AIR	DATARAN RENDAH	C4			
		TAMALATE	MANGGALA	RT001-RW004	1,42	376	230	971121.8147	1192436.6047	20	ELAKUN RINGAN	9	SEDANG	LEGAL	DATARAN RENDAH	C1			
		TAMALATE	TANJUNG BERTINGGA	RT001-RW004	4,88	273	48	971121.8147	1192436.6047	20	ELAKUN RINGAN	9	SEDANG	LEGAL	DATARAN RENDAH	C1			
		TAMALATE	TANJUNG BERTINGGA	RT002-RW004	4,88	392	58	971121.8147	1192436.6047	19	ELAKUN RINGAN	9	SEDANG	LEGAL	DATARAN RENDAH	C1			
		TAMALATE	TANJUNG BERTINGGA	RT003-RW004	4,88	246	62	971121.8147	1192436.6047	20	ELAKUN RINGAN	9	SEDANG	LEGAL	DATARAN RENDAH	C1			
		TAMALATE	TANJUNG BERTINGGA	RT004-RW003	2,84	304	60	971121.8147	1192436.6047	20	ELAKUN RINGAN	9	SEDANG	LEGAL	DATARAN RENDAH	C1			
		TAMALATE	TANJUNG BERTINGGA	RT005-RW008	1,20	283	200	97090.9817	1192436.6047	20	ELAKUN RINGAN	9	SEDANG	LEGAL	DATARAN RENDAH	C1			
		TAMALATE	TANJUNG BERTINGGA	RT006-RW004	3,87	242	67	97090.9817	1192436.6047	20	ELAKUN RINGAN	9	SEDANG	LEGAL	DATARAN RENDAH	C1			
		TAMALATE	TANJUNG BERTINGGA	RT007-RW003	1,88	177	48	971121.8147	1192436.6047	20	ELAKUN RINGAN	9	SEDANG	LEGAL	DATARAN RENDAH	C1			
		TAMALATE	TANJUNG BERTINGGA	RT008-RW008	1,82	222	220	97090.9817	1192436.6047	20	ELAKUN RINGAN	9	SEDANG	LEGAL	DATARAN RENDAH	C1			
		TAMALATE	TANJUNG BERTINGGA	RT009-RW003	0,82	343	38	971121.8147	1192436.6047	17	ELAKUN RINGAN	9	SEDANG	LEGAL	DATARAN RENDAH	C1			
		TOTAL LUAS KAWASAN					28 RT	5423	1.888	587	971121.8147	1192436.6047	14	ELAKUN RINGAN	9	SEDANG	LEGAL & DUA TIERS AIR	C1	

Daftar Lokasi Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Makassar

NO	NAMA LOKASI (KAWASAN)	LINGKUP ADMINISTRASI				KEPENDUDUKAN		KEKORBATAN			KEKUALIFIKASIAN		PERUBAHAN LAJUR		LEGALITAS	TIPOLOGI KUMUH	KUALIFIKASI	PRIORITAS	
		KECAMATAN	KELOMPOKAN	RT/RW	LUAS (M ²)	Jumlah Jiwa	REPERKAWAN (Jumlah/ha)	UMUM	BUDUK	MLA	TINGKAT	MLA	TINGKAT						
	TALLI	PAANMAMPU	RT001-RW000	1,79	487	281	97272.707	1192370.0277	18	ELAKUN RINGAN	9	SEDANG	LEGAL	DATARAN RENDAH	C1				
		PAANMAMPU	RT002-RW000	0,59	274	517	97272.707	1192370.0277	22	ELAKUN RINGAN	9	SEDANG	LEGAL	DATARAN RENDAH	C1				
		PAANMAMPU	RT004-RW001	0,99	482	467	97272.707	1192370.0277	11	ELAKUN RINGAN	9	SEDANG	LEGAL	DATARAN RENDAH	C1				
		PAANMAMPU	RT004-RW004	0,71	328	441	97272.707	1192370.0277	15	ELAKUN RINGAN	9	SEDANG	LEGAL	DATARAN RENDAH	C1				
		PAANMAMPU	RT005-RW001	0,71	681	934	97272.707	1192370.0277	21	ELAKUN RINGAN	9	SEDANG	LEGAL	DATARAN RENDAH	C1				
		PAANMAMPU	RT005-RW002	0,95	227	649	97272.707	1192370.0277	17	ELAKUN RINGAN	9	SEDANG	LEGAL	DATARAN RENDAH	C1				
		PAANMAMPU	RT005-RW004	0,73	138	318	97272.707	1192370.0277	21	ELAKUN RINGAN	9	SEDANG	LEGAL	DATARAN RENDAH	C1				
		PAANMAMPU	RT005-RW005	1,36	991	301	97272.707	1192370.0277	27	ELAKUN RINGAN	9	SEDANG	LEGAL	DATARAN RENDAH	C1				
		PAANMAMPU	RT005-RW006	0,71	482	618	97272.707	1192370.0277	22	ELAKUN RINGAN	9	SEDANG	LEGAL	DATARAN RENDAH	C1				
		PAANMAMPU	RT005-RW003	0,55	234	421	97272.707	1192370.0277	19	ELAKUN RINGAN	9	SEDANG	LEGAL	DATARAN RENDAH	C1				
	TALLI	PAANMAMPU	RT007-RW004	0,58	421	711	97272.707	1192370.0277	17	ELAKUN RINGAN	9	SEDANG	LEGAL	DATARAN RENDAH	C1				
		PAANMAMPU	RT008-RW004	0,40	505	1181	97272.707	1192370.0277	29	ELAKUN RINGAN	9	SEDANG	LEGAL	DATARAN RENDAH	C1				
		TOTAL LUAS KAWASAN					10 RT	3811	1021	1897	97272.707	1192370.0277	13	SEDANG	LEGAL	DATARAN RENDAH DAN TIERS AIR	C1		
		3	Bantaran Kanal JUPUPP	TAMALATE	MACCINI SOMBALA	RT004-RW003	1,56	441	194	97090.9817	1192410.497	19	ELAKUN RINGAN	9	SEDANG	LEGAL	DATARAN RENDAH	C1	
				TAMALATE	MACCINI SOMBALA	RT005-RW003	2,84	183	81	97090.9817	1192410.497	11	ELAKUN RINGAN	9	SEDANG	LEGAL	DATARAN RENDAH	C1	
				TAMALATE	MACCINI SOMBALA	RT006-RW006	0,75	341	418	97090.9817	1192410.497	20	ELAKUN RINGAN	9	SEDANG	LEGAL	DATARAN RENDAH	C1	
				MAMAJANG	SAMULUNG LAHA	RT005-RW003	1,68	244	278	97090.9817	1192410.497	19	ELAKUN RINGAN	9	SEDANG	LEGAL	DATARAN RENDAH	C1	
				MARISO	BONTORANNU	RT001-RW003	0,38	281	584	97090.9817	1192423.297	16	ELAKUN RINGAN	9	SEDANG	LEGAL	DATARAN RENDAH	C1	
				MARISO	BONTORANNU	RT003-RW003	1,07	397	370	97090.9817	1192423.297	27	ELAKUN RINGAN	9	SEDANG	LEGAL	DATARAN RENDAH	C1	
				MARISO	BONTORANNU	RT004-RW004	0,63	287	454	97090.9817	1192423.297	22	ELAKUN RINGAN	9	SEDANG	LEGAL	DATARAN RENDAH	C1	
MARISO	BONTORANNU			RT005-RW003	0,57	171	302	97090.9817	1192423.297	16	ELAKUN RINGAN	9	SEDANG	LEGAL	DATARAN RENDAH	C1			
MARISO	BONTORANNU			RT006-RW004	0,56	222	440	97090.9817	1192423.297	16	ELAKUN RINGAN	9	SEDANG	LEGAL	DATARAN RENDAH	C1			
MARISO	RT 01 RW 04				0,89	184	288	97090.9817	1192423.297	16	ELAKUN RINGAN	9	SEDANG	LEGAL	DATARAN RENDAH	CA			
MARISO	BONTORANNU			RT 03 RW 02	0,63	487	778	97090.9817	1192423.297	22	ELAKUN RINGAN	9	SEDANG	LEGAL	DATARAN RENDAH	C1			

BIOGRAFI PENULIS



RAUDATUL JANNAH LAHYA, Lahir di Makassar pada tanggal 24 November 2001. Merupakan anak ke tiga dari tiga bersaudara. Penulis merupakan anak dari pasangan Bapak Lahya S, S.Pd dan Ibu Badriah. Penulis menyelesaikan pendidikannya di jenjang bangku sekolah dasar di SD Inpres Sambung Jawa 3 pada tahun 2007 dan lulus pada tahun 2013, lanjut lagi pendidikan di SMP Negeri 1 Makassar pada tahun 2013 sampai tahun 2016, penulis melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 1 Makassar pada tahun 2016 sampai tahun 2019. Kemudian di tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Negara hingga selesai pada tahun 2023.

